



**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
SUMATERA  
UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**M. AKMAL**  
NPM: 1515100005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. Akmal  
NPM : 1515100005  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S 1 ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN /  
KOTA SUMATERA UTARA

MEDAN, Agustus 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, SE., M.Si)

DEKAN

(Dr. Surya Nida, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Dwi Saraswati, SPd., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
M E D A N**

**PERSETUJUAN UJIAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

NAMA : M. Akmal  
NPM : 1515100005  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S I ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN /  
KOTA SUMATERA UTARA

MEDAN, Agustus 2020

KETUA

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA-I

(Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA-II

(Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si.,)

ANGGOTA-III

(Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si)

ANGGOTA-IV

(Hernawaty, SE., MM)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : M AKMAL

NPM : 1515100005

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, february 2020

Penulis



M.Akmal

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : M AKMAL

NPM : 1515100005

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Februari 2020

Penulis



M. Akmal



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO,BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AKMAL  
 Tgl. Lahir : MEDAN / 21 November 1997  
 NIM / NPM : 1515100005  
 Jurusan / Studi : Akuntansi  
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik  
 Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3,55  
 No. P : 085261964916  
 yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

#### Judul

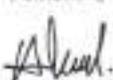
MUJIB KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu

  
 ( Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 15 Maret 2019

Pemohon,  
  
 ( M. Akmal )

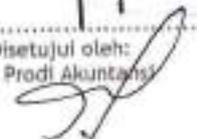
Tanggal : .....

Disahkan oleh  
 Dekan

  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

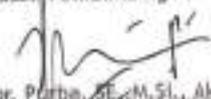
Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi

  
 ( Anggi Pratama Narution, SE., M.Si )

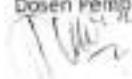
Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :

  
 ( Rohima br. Parbe, SE., M.Si., Ak., CA. )

Tanggal : 22-03-2019

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:

  
 ( DWI SARASWATI, S.Pd., M.Si )

No. Dokumen: FM-UPBA-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 15 Maret 2019 11:19:36



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : SOSIAL SAINS  
 : Rahina Br. Purba SE, MSi, AK, CA  
 : Dwi Samswati SPd, M.Si  
 : M. AKMAL  
 : Akuntansi  
 : 1515100005  
 : Strata 1  
 : Analisis Kemampuan Kelonggaran Pasca Terhadap bencana daerah  
 : Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

TAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
- 2022	- Kata Pengantar - Daftar Isi - Daftar tabel. - Up date Ref		
11-2020	- Perbaiki keastrian penelitian - Page lb, font disesuaikan. - Definisi Operasional - Sample dirapikan		
11-2020	- Margin ? - Oke kembali daftar ?		
- 2020	Acc. Moga Hilar		

Medan, 27 Januari 2020  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Tejo (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi  
 SOSIAL SAINS  
 Rahma Br Rucha S.E., Msi., Ak. CA.  
 Dwi Saraswati S.Pd., Msi.  
 M. AKMAL  
 Akuntansi  
 1515100005  
 Strata 1  
 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah  
 Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota  
 Provinsi Sumatera Utara

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2020	Perbaikan Proposal	<u>SR</u>	
2020	Bab IV → hasil penelitian	<u>SR</u>	
2020	Pembahasan → jurnal pendukung berkeuntungan	<u>SR</u>	
2020	Acc Sidang	<u>SR</u>	Acc Sidang 27/1/2020 

Medan, 27 Januari 2020

Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme... 36 %

FH-BPAA-2012-041

Mohonan Meja Hijau

Medan, 05 FEBRUARI 2020

Ka. LPMU

THARMIZI HAFM

Medan, 05 Februari 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Telah di terima  
berkas persyaratan  
dapat di proses  
Medan, 05 / 02 / 2020

A. B. BPAA

TEGUH WARYONO, SE., MM.

Yang terhormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AKMAL  
Jat/Tgl. Lahir : Medan / 21 November 1997  
Orang Tua : ARMEA  
No. ID : 1515100005  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 085261964916  
Alamat : Jl. GAPERTA GG. PRIBADI LK II NO 158 A

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKX yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah di jilid 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas joruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplakan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKROL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	-
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. Uk. 50 %	: Rp.	2,625,000

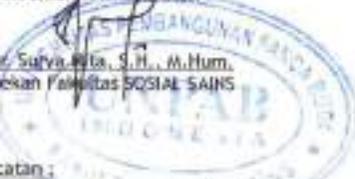
Total H. 4.725.000

5/Februari  
2020

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : L

Diketahui / Disetujui oleh :



Hormat Saya

M. AKMAL  
1515100005

Catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Nhs.ybs.

Telah Diperiksa oleh UKM-C  
Medan, 5.2.2020

Ka. UKM-C

Rim Agustina, S.Sos., MSP



# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

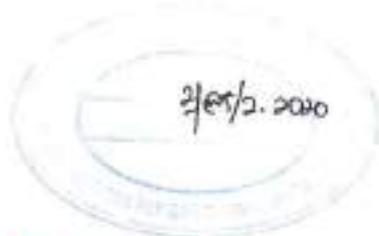
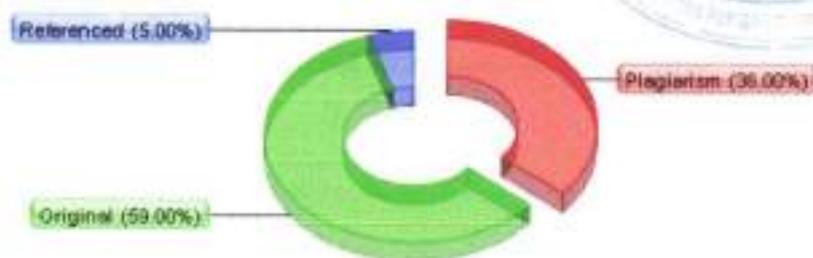
Analyzed document: 02/01/20 10:07:32

## M. AKMAL\_1515100005\_AKUNTANSI.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 16 wrds: 3669 <https://id.123dok.com/document/lzgw706y-analisis-kemampuan-keuangan-daerah-terha...>
- 15 wrds: 2151 <http://balitbang.pemkomedan.go.id/inymcepublic/gambar/file/DEBBIY%20DEBORA.pdf>
- 14 wrds: 1984 <https://id.123dok.com/document/eqpdv/z1-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-per...>

Other Sources:]

Processed resources details:

157 - Ok / 12 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Active References (UrIs Extracted from the Document):

detected

Excluded UrIs:

detected

Acc Jilid  
25/11-2020  
*[Signature]*



Acc Jilid  
25/11-2020  
*[Signature]*

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA  
SUMATERA  
UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**M. AKMAL**  
NPM: 1515100005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara". Dengan Metode sampel Jenuh, maka sampel diambil berdasarkan populasi yaitu 33 Kabupaten/Kota. Pendekatan dari Penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan model regresi linear sederhana. Data yang di dapatkan melalui pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi pemerintahan yang sudah dipublikasikan untuk umum dan diolah melalui bantuan aplikasi SPSS 19. Hasil data menunjukkan linear sederhana yaitu  $Y=20.407+0,442x$  dimana jika analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 19,6% maka hasil uji determinasi dari R square adalah sebesar 19,6% menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di pengaruhi belanja daerah bahwa secara parsial, Analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi sebesar 19,6% dan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainya diluar dari penelitian ini.

Kata Kunci : kemampuan Keuangan ,dan Belanja daerah.

## **ABSTACT**

*This study aims to determine and explain the analysis of the financial capacity of district / city regional expenditure in Nort Sumatra Province". With the saturated sample method, the sample is based on the population of 33 districts / cities. The approach of this research is descriptive quantitative with a simple linier regression model. Data obtained throught data collection collected through official government document records that have been published publicly and processed through the help of SPSS 19. The result of the data show a simple linier  $Y = 20,407 + 0,442 = e$ , where if the analysis of the regional financial capacity of regional spending has increased respectively by 19.6%, then the result of the determination test of R square is 19.6% showing tha the regional financial capacity is influenced by regional spending that partially, the regional capitability analyst towards district / city regional expenditure in North Sumatra Province. This can be seen from the regression equation of 19.6% and the remaining 80.4% is influenced by factors or orther variables outside of this study.*

*Keywords: financial Capability, and Regional Expenditure*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara".

Pada kesempatan ini, mengingat banyaknya dukungan, bantuan dan bimbingan yang penulis terima selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima br purba , SE., M.Si., Ak.,Ca selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu Dwi Saraswati, SPd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai. Ayahanda Armea dan Ibunda Nur Aini. Terimakasih telah merawat, mendidik, memperhatikan dan memberikan dukungan penuh baik secara material dan non material serta semua dukungan, doa kasih sayang, semangat dan motivasi atas

doa, motivasi dan segala dukungan yang tiada henti pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Ayahanda dan ibunda adalah inspirasi dan sumber semangat saya dalam menyelesaikan studi ini serta motivasi-motivasi yang beliau berikan membuat saya menjadi kuat dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini.

7. Kepada saudara kandung saya kakanda tersayang, Fitriyani dan Muhammad Abrar. Terimakasih telah memberikan nasehat dan menjadi contoh tauladan yang baik.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabatku Nadya, Putri, Adit. terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. kepada seluruh teman-teman se-Angkatan terima kasih atas dorongan semangat serta kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Februari 2020

Penulis

M.Akmal

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara". Dengan Metode sampel Jenuh, maka sampel diambil berdasarkan populasi yaitu 33 Kabupaten/Kota. Pendekatan dari Penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan model regresi linear sederhana. Data yang di dapatkan melalui pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi pemerintahan yang sudah dipublikasikan untuk umum dan diolah melalui bantuan aplikasi SPSS 19. Hasil data menunjukkan linear sederhana yaitu  $Y=20.407+0,442x$  dimana jika analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 19,6% maka hasil uji determinasi dari R square adalah sebesar 19,6% menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah di pengaruhi belanja daerah bahwa secara parsial, Analisis kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi sebesar 19,6% dan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainya diluar dari penelitian ini.

Kata Kunci : kemampuan Keuangan ,dan Belanja daerah.

## **ABSTACT**

*This study aims to determine and explain the analysis of the financial capacity of district / city regional expenditure in Nort Sumatra Province". With the saturated sample method, the sample is based on the population of 33 districts / cities. The approach of this research is descriptive quantitative with a simple linier regression model. Data obtained throught data collection collected through official government document records that have been published publicly and processed through the help of SPSS 19. The result of the data show a simple linier  $Y = 20,407 + 0,442 = e$ , where if the analysis of the regional financial capacity of regional spending has increased respectively by 19.6%, then the result of the determination test of R square is 19.6% showing tha the regional financial capacity is influenced by regional spending that partially, the regional capitability analyst towards district / city regional expenditure in North Sumatra Province. This can be seen from the regression equation of 19.6% and the remaining 80.4% is influenced by factors or orther variables outside of this study.*

*Keywords: financial Capability, and Regional Expenditure*

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Kemampuan Daerah .....	11
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	15
3. Belanja Daerah .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	22
D. Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	24
C. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional .....	25
D. Populasi Dan Sampel .....	26
E. Jenis Dan Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Gambaran Umum Instansi Sumatera Utara .....	33
a. Sejarah Ringkas .....	33
b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara .....	34
c. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara .....	35
2. Data Penelitian .....	35

3.	Uji Statistik Deskriptif .....	36
4.	Uji Asumsi Klasik .....	81
a.	Uji Normalitas .....	81
b.	Uji Multikolinieritas .....	83
c.	Uji Heterokedastisitas .....	84
d.	Uji Autokorelasi .....	85
e.	Analisis Regresi .....	86
5.	Uji Hipotesis .....	86
a.	Uji Pengaruh Parsial ( Uji t) .....	86
b.	Pengujian Determinasi ( $R^2$ ) .....	87
B.	Pembahasan .....	88
1.	Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	88
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
TABEL 1.1 Ringkasan Belanja, Keuangan Daerah Dan Opini Audit .....	5
TABEL 2.1 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah .....	16
TABEL 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya .....	21
TABEL 3.1 Skedul Proses Penelitian .....	25
TABEL 3.2 Definisi Operasional .....	26
TABEL 4.1 Kabupaten Nias .....	37
TABEL 4.2 Kabupaten Mandailing Natal .....	38
TABEL 4.3 Kabupaten Tapanuli Selatan .....	39
TABEL 4.4 Kabupaten Tapanuli Tengah .....	40
TABEL 4.5 Kabupaten Tapanuli Utara .....	41
TABEL 4.6 Kabupaten Toba Samosir .....	43
TABEL 4.7 Kabupaten Labuhan Batu .....	44
TABEL 4.8 Kabupaten Asahan .....	45
TABEL 4.9 Kabupaten Simalungun .....	46
TABEL 4.10 Kabupaten Dairi .....	48

TABEL 4.11 Kabupaten Karo .....	49
TABEL 4.12 Kabupaten Deli Serdang .....	50
TABEL 4.13 Kabupaten Langkat .....	51
TABEL 4.14 Kabupaten Nias Selatan .....	53
TABEL 4.15 Kabupaten Humbang Hasumdutan .....	54
TABEL 4.16 Kabupaten Pak Pak Bharat .....	55
TABEL 4.17 Kabupaten Samosir .....	57
TABEL 4.18 Kabupaten Serdang Bedagai .....	58
TABEL 4.19 Kabupaten Batu Bara .....	59
TABEL 4.20 Kabupaten Padang Lawas Utara .....	61
TABEL 4.21 Kabupaten Padang Lawas .....	62
TABEL 4.22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	64
TABEL 4.23 Kabupaten Labuhan Batu Utara .....	65
TABEL 4.24 Kabupaten Nias Utara .....	66
TABEL 4.25 Kabupaten Nias Barat .....	68
TABEL 4.26 Kota Sibolga .....	69
TABEL 4.27 Kota Tanjung Balai .....	70

TABEL 4.28 Kota Pematang Siantar .....	71
TABEL 4.29 Kota Tebing Tinggi .....	73
TABEL 4.30 Kota Medan .....	74
TABEL 4.31 Kota Binjai .....	75
TABEL 4.32 Kota Padang Sidempuan .....	77
TABEL 4.33 Kota Gunung Sitoli .....	78
TABEL 4.34 Hasil Uji Multikolinearitas .....	80
TABEL 4.35 Pengujian Autokorelasi .....	82
TABEL 4.36 Coefficients .....	83
TABEL 4.37 Model Summary .....	84

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
GAMBAR 2.1 Kerangka Konseptual .....	22
GAMBAR 4.1 Kabupaten Nias .....	36
GAMBAR 4.2 Kabupaten Mandailing Natal .....	37
GAMBAR 4.3 Kabupaten Tapanuli Selatan .....	38
GAMBAR 4.4 Kabupaten Tapanuli Tengah .....	39
GAMBAR 4.5 Kabupaten Tapanuli Utara .....	41
GAMBAR 4.6 Kabupaten Toba Samosir .....	42
GAMBAR 4.7 Kabupaten Labuhan Batu .....	43
GAMBAR 4.8 Kabupaten Asahan .....	45
GAMBAR 4.9 Kabupaten Simalungun .....	46
GAMBAR 4.10 Kabupaten Dairi .....	47
GAMBAR 4.11 Kabupaten Karo .....	48
GAMBAR 4.12 Kabupaten Deli Serdang .....	50
GAMBAR 4.13 Kabupaten Langkat .....	51
GAMBAR 4.14 Kabupaten Nias Selatan .....	52
GAMBAR 4.15 Kabupaten Humbang Hasundutan .....	54
GAMBAR 4.16 Kabupaten Pak Pak Bharat .....	55

GAMBAR 4.17 Kabupaten Samosir .....	56
GAMBAR 4.18 Kabupaten Serdang Bedagai .....	58
GAMBAR 4.19 Kabupaten Batu Bara .....	59
GAMBAR 4.20 Kabupaten Padang Lawas Utara .....	61
GAMBAR 4.21 Kabupaten Padang Lawas .....	62
GAMBAR 4.22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan .....	64
GAMBAR 4.23 Kabupaten Labuhan Batu Utara .....	65
GAMBAR 4.24 Kabupaten Nias Utara .....	67
GAMBAR 4.25 Kabupaten Nias Barat .....	68
GAMBAR 4.26 Kota Sibolga .....	69
GAMBAR 4.27 Kota Tanjung Balai .....	70
GAMBAR 4.28 Kota Pematang Siantar .....	72
GAMBAR 4.29 Kta Tebing Tinggi .....	73
GAMBAR 4.30 Kota Medan .....	74
GAMBAR 4.31 Kota Binjai .....	76
GAMBAR 4.32 Kota Padang Sidempuan .....	77
GAMBAR 4.33 Kota Gunung Sitoli .....	79
GAMBAR 4.34 Pp Plot Uji Normalitas .....	80

GAMBAR 4.35 Hasil Uji Histogram .....	80
GAMBAR 4.36 Scatterplot Heterokedastisitas .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menuntut kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pembangunan dan anggaran belanja rutin tidak lagi berasal dari pusat. Tetapi, lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri.

Laporan keuangan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan keuangan daerah dalam era ekonomi daerah sering diukur dengan keberhasilan daerah dalam mengalami otonomi daerah (Mahmudi, 2016). Sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat memegang tanggung jawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan standarisasi sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung

jawab tersebut.

Untuk itu Pemerintah mengharapkan Provinsi Sumatera dengan kemampuan daerahnya dan potensi-potensi yang terkandung dapat dipergunakan untuk membiayai dan membelanjakan kepentingan daerahnya dan meminimalisir ketergantungan dengan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak awal tahun perkembangan kedua regulasi ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Kedua Undang-Undang ini memberikan suatu kewajiban bahwa suatu daerah itu harus mampu untuk mengembangkan daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu unsur dalam menentukan pembangunan di daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar PAD yang didapatkan memungkinkan mereka untuk mencukupi kegiatan-kegiatan belanja daerah, Salah satu alternatif yang dapat memicu kesinambungan dan juga konsistensi pembangunan daerah untuk mencapai keberhasilan daerah ialah membuat anggaran belanja operasi. Hal ini dapat mengukur keberhasilan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah mengukur efisiensi dan efektivitas (Halim,2008:113).

Dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim,2008:116)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang selanjutnya disebut dengan PEMENDAGRI, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan tersebut, lembaga pemerintah dalam melaksanakan ekonominya membutuhkan lembaga akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonominya oleh karena itu pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang di cita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintah indonesia.

Salah satu aspek pemerintahan yang harus diperhatikan dan diatur secara hati-hati ialah Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Pendapatan APBN yang di alokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah atau dengan kata lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah, belanja daerah variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel belanja, maka terdapat ilusi

fiskal. (priyo,2009:4).

Belanja Daerah menurut pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta, sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tetapi harus direncanakan terlebih dahulu. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara merupakan cerminan pemerintah daerah mampu dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. (Wijayanti,2017). Variabel pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. (Kurniasih, 2012). Hal yang diharapkan oleh pemerintah pusat yaitu pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dilihat jika pemerintah daerah mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya sendiri dengan tingkat ketergantungan pemerintah pusat yang mempunyai proporsi yang semakin mengecil di setiap periodenya.

Berikut ini adalah kolom Belanja Daerah dan Keuangan Daerah dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara peneliti mengambil 5 kabupaten / kota untuk memberikan gambaran kemandirian suatu daerah dari

keuangan daerah dalam kurun waktu 2014 sampai tahun 2016:

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Belanja, Keuangan Daerah serta Opini Audit**

NO	KAB/KOTA	BELANJA DAERAH			PENDAPATAN DAREAH			OPINI AUDIT		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	MEDAN	4.366.467.365	4.374.968.274	4.525.321.332	4.324.553.187	4.259.044.491	4.308.242.686	WTP DPP	WDP	WDP
2	LANGKAT	1.605.301.211	1.934.943.728	2.287.199.857	1.682.148.382	2.020.688.705	2.215.047.135	WDP	WDP	WDP
3	KARO	889.667.378	1.326.869.181	1.542.011.009	1.010.908.170	1.470.455.673	1.456.336.375	WDP	WDP	TMP
4	BINJAI	804.308.313	885.211.617	945.566.274	804.091.376	843.711.784	964.637.551	WTP DPP	WDP	WTP
5	SERGAI	1.010.452.029	1.221.917.604	1.465.701.623	1.087.160.371	1.269.303.511	1.433.427.866	WTP DPP	WDP	WDP

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Keuangan RI, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja daerah Medan pada Tahun 2014 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.4.366.467.365) lebih tinggi dari pendapatan daerah sebesar (Rp.4.324.553.187) yang disusul dengan opini audit WTP DPP, sedangkan Tahun 2015 menunjukkan anggaran belanja daerah sebesar (Rp.4.374.968.274) sedikit lebih rendah dari pendapatan daerah sebesar (4.259.044.491) yang mulai membaik disusul dengan opini audit WDP dan sedangkan ditahun 2016 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.4.525.321.332) kembali lebih tinggi dari pendapatan daerah sebesar (Rp.4.308.242.686) disusul dengan opini audit WDP. Menunjukkan bahwa kota medan belum mandiri.

Langkat pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa an belanja daerah sebesar (Rp.1.605.301.211) lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan daerah sebesar (Rp.1.682.148.382) disusul dengan opini audit WDP, 2015 belanja daerah sebesar (Rp.1.934.943.728) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.2.020.688.705) disusul dengan opini audit WDP, ditahun 2016 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.2.287.199.857) meningkat dari pendapatan daerah sebesar (Rp.2.215.045.135) disusul dengan opini audit WDP. Menunjukkan bahwa Kabupaten langkat mulai mandiri.

Karo 2014 menunjukkan anggaran belanja daerah sebesar (Rp.889.667.378) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.010.908.170) disusul dengan opini audit WDP, ditahun 2015 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.1.326.869.181) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.470.455.673) disusul dengan opini audit WDP, dan ditahun 2016 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.1.542.011.009) meningkat dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.456.336.375) disusul dengan opini audit TMP. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten karo belum mandiri.

Binjai 2014 menunjukkan anggaran belanja daerah (Rp.804.308.313) meningkat dari pendapatan daerah sebesar (Rp.804.091.376) disusul dengan opini audit WTP DPP, ditahun 2015 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.885.211.617) meningkat dari pendapatan daerah sebesar (Rp.843.711.784) dengan opini audit WDP, dan ditahun 2016 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.945.566.274) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.964.637.551) dengan opini audit WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kota binjai belum sepenuhnya mandiri.

Sergai 2014 menunjukkan anggaran belanja daerah sebesar (Rp.1.010.452.029) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.087.160.371) disusul dengan opini audit WTP DPP, ditahun 2015 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.1.221.917.604) menurun dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.269.303.511) disusul dengan opini audit WDP, dan ditahun 2016 anggaran belanja daerah sebesar (Rp.1.465.701.623) meningkat dari pendapatan daerah sebesar (Rp.1.433.427.866) disusul dengan adanya opini audit WDP. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten sergai mulai terlihat mandiri.

Berdasarkan uraian dan tabel diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Adapun indentifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kemampuan daerah yang ada di Kabupaten/Kota sumatera utara untuk mewujudkan kemandirian daerah.
- 2) Tampak dari tabel 1.1 belanja daerah masih melonjak lebih tinggi dari pada kemampuan daerah.
- 3) Opini audit TMP yang masih diperoleh kab/kota sumatera utara.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya, yaitu mengenai Analsis Kemampuan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2017. Untuk variabel penelitian peneliti hanya menganalisa dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan, untuk Belanja Daerah peneliti menggunakan semua komponen belanja daerah. Dan peneliti hanya menggunakan alat Rasio Kemandirian.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017?
- 2) Apakah Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Kab/Kota Sumatera Utara Periode 2013-2017?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana kemandirian keuangan daerah pada daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utaraperiode 2013-2017.
- 2) Untuk mengetahui apakah kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2017.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

#### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kab/Kota Sumatera Utara.

#### **1.4.2.2 Bagi Instalasi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan Kab/kota Sumatera Utara.

#### **1.4.2.3 Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kab/Kota Sumatera Utara.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Jumasi Purba, 2011) yang berjudul: “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Era Otonomi Daerah”. Sedangkan, judul peneliti adalah “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- 1) **Waktu penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2011, sedangkan peneliti melakukan riset di tahun 2019.
- 2) **Lokasi penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Sumut Otonomi Daerah. Lokasi penelitian juga di Provinsi Sumut.
- 3) **Model penelitian:** Dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisa regresi berganda dan penelitian sekarang menggunakan model analisis regresi linier sederhana hanya menggunakan 2 variabel yaitu kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kemampuan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kemampuan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang maupun bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sepanjang sebelum dimiliki atau dikuasai oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mahesa, 2009).

Kemampuan Daerah juga erat kaitannya dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena semakin stabil dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan daerah tersebut bisa lebih mandiri dalam mengelola daerahnya. Serta perimbangan dari pusat juga masih dibutuhkan untuk membantu anggaran operasional belanja daerah yaitu Dana Alokasi Umum. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kemampuan daerah ialah daerah otonomi yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan perkembangan daerah sendiri berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai modal belanja daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah menjelaskan tentang jenis-jenis Keuangan daerah yang terdiri dari:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar taguhan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah.
- 4) Pengeluaran daerah.
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan kepentingan umum.

### **2.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Adapun klasifikasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat yaitu:

#### 1) Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PDRD Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

#### 2) Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat pengeluaran pemerintah daerah adalah untuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan selalu meningkat, antara lain ialah :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c) Retribusi Biaya cetak KTP
  - d) Retribusi Pelayanan Pasar
  - e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - f) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - g) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain ialah :

- a) Bagi laba perusahaan milik daerah
  - b) Bagi laba lembaga keuangan
  - c) Bagi laba lembaga non keuangan
  - d) Bagi laba atas penyertaan modal/investasi.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualandan/atau jasa oleh daerah.

### **2.1.1.3 Pengertian Dana Alokasi Umum**

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum juga diperuntukan untuk menutup kesejangan fiska (*fiscal gap*) antar daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas melayani masyarakat (Panggabean, 2014:13).

### **2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Mandirinya suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang di terima oleh suatu daerah yang dibandingkan dengan penerimaan dana transfer pemerintah pusat. Unsur utama yang digunakan untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah adalah PAD (kementerian keuangan republik indonesia (2011)). "PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Pad bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain hasil daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah yang sah. Maka dari hal di

atas setiap daerah di harapkan mampu untuk meningkatkan PAD untuk bisa berdiri sendiri agar bisa terciptanya daerah yang mandiri. (Halim,2007:232) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di rumuskan sebagai berikut:

---

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan Kemandirian**  
**dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

*Sumber :Halim, 2007.*

Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2007:169) mengemukakan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, artinya peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam memberikan bantuannya untuk membiayai kebutuhan daerah dari pada kemandirian daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- 2) Pola hubungan konsultatif, artinya campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah semakin

berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan telah mendekati mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

- 4) Pola hubungan delegatif, artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi dikarenakan daerah bersangkutan sudah mampu untuk melaksanakan urusan otonomi daerah oleh karena itu daerah tersebut dikatakan sudah mandiri. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Belanja menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang standart akuntansi pemerintahan pernyataan Nomor 2 adalah “semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok menurut Permendagri 13/2006 Belanja Daerah terdiri atas :

Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bentuk sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

### **2.1.3.1 Belanja Langsung**

Belanja langsung menurut pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Belanja langsung adalah jenis belanja yang dilakukan oleh satuan kerja yang dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah atau negara kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan (Singkoh, 2014). Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan atau Aktivitas Mahmudi,(2010:165).

Belanja langsung dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai (honorium dan upah), digunakan untuk pengeluaran honorium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja modal

Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan

untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

### **2.1.3.2 Belanja Tidak Langsung**

Permendagri (peraturan menteri dalam negeri) Nomor 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung terdiri dari:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiun, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2) Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5) Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana

alam dan berencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kab/Kota Sumatera Utara. Berikut ini merupakan ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu yang telah penulis kumpulkan yaitu:

Tabel 2.2 Mapping Peneliti Sebelumnya

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	R.Agoes Kamaroellah (2017)	Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	X= Analisis Tingkat Kemampuan Daerah Y= Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah kabupaten pamekasan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan tingkat kemampuan daerah yang masih kurang
2	Jumasi Purba (2010)	Analisis Kemampuan keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Era Otonomi Daerah	X <sub>1</sub> = Analisis Kemampuan Daerah Y= Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Era Otonomi Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Dapat simpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di sumatera utara era otonomi daerah periode 2001 sampai dengan 2008 mempunyai pengaruh positif dan signifikan
3	Abdul Wahab	Analisis Kemampuan	X= Analisis Kemampuan	Deskriptif Kuantitatif	Dapat disimpulkan

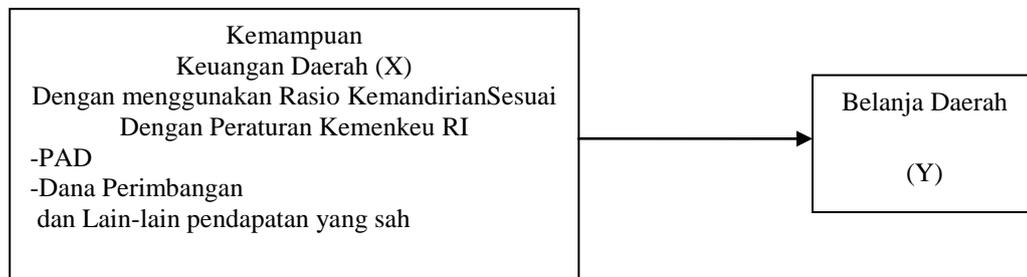
	(2016)	Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura	Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura		bahwa kemampuan keuangan daerah kabupten jayapura memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi sehingga membuat tingkat kemandirian yang kurang dan tingkat desentralisasi fiskal yang sangat kurang, namun efektifitas penerimaan PAD sangat efektif dan efisien.
--	--------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.3 Kerangka Konseptual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang maupun bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sepanjang sebelum dimiliki atau dikuasai oleh negara maupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana termaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam membiayai keseluruhan kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya yang disebut dengan Kemampuan Keuangan. Kemampuan Keuangan Daerah juga menggambarkan sejauhmana Pemerintah Pusat ikut terlibat dalam Pembiayaan Pembangunan di daerah, semakin mandiri suatu daerah maka akan semakin kecil peran Pemerintah pusat, hal ini disebut dengan kemandirian Daerah. Kemandirian Daerah dapat tercipta dengan menggali keseluruhan potensi-

potensi daerah yang tersedia yang terwujud dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka Dana Transfer Pemerintah pusat dapat diminimalisir. Hal inilah wujud Kemandirian daerah.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Asosiatif Kuantitatif dengan metode analisis Regresi Linier Sederhana, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Menurut Rusiadi, dkk (2014:12) Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antar satu variabel independent (bebas) dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya (terikat). Sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya,

“Penelitian asosiatif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk berpengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Pemprov Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Asrama No.179,Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu peneliti ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 dan untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skedul Proses Penelitian**

NO	Jenis kegiatan	Maret' 19	April'19	Juni' - Juli' 19	Juli' - Ags 19	Jan' 20	Feb'20
1	Pengajuan Judul	■					
2	Penyusunan proposal		■	■	■		
3	Seminar proposal				■		
4	Perbaikan/Acc Proposal				■	■	
5	Pengolahan data					■	
6	Penyusunan skripsi						■
7	Bimbingan Skripsi						■
8	Sidang Meja Hijau						■

Sumber : Penulis (2019)

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang akan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu : variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan (Rasio kemandirian keuangan daerah) dan sedangkan variabel terikatnya adalah belanja daerah.

#### 3.3.2 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian, maka diperlukan definisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Definisi Operasional**

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Belanja Daerah (Y)	semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005)	Total Belanja Daerah  (Sumber Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)	Nominal

Kemampuan Keuangan Daerah (X)	semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian ppula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundangan yang berlakuMenurut Mahesa, (2009).	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pusat, Provinsi, dan Pinjaman}} \times 100\%$ <p>Sumber(Halim, 2007:232).</p>	Rasio
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2019)

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atau seluruh objek/subjek penelitian. Menurut Rusiadi, dkk (2013:35) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten Pemerintah Daerah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### 3.4.2 Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sample jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel adalah dari semua populasi yang diteliti di Kab/Kota Provinsi Sumut yang berjumlah

33 Kab/kota dalam kurun waktu 5 tahun. Daftar sampel penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 3.3 Daftar Kabupaten/Kota yang menjadi sampling**

No	Kabupaten/Kota	Sampel
1	Kabupaten Nias	Sampel 1
2	Kabupaten Mandailing Natal	Sampel 2
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sampel 3
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sampel 4
5	Kabupaten Tapanuli Utara	Sampel 5
6	Kabupaten Toba Samosir	Sampel 6
7	Kabupaten Labuhan Batu	Sampel 7
8	Kabupaten Asahan	Sampel 8
9	Kabupaten Simalungun	Sampel 9
10	Kabupaten Dairi	Sampel 10
11	Kabupaten Karo	Sampel 11
12	Kabupaten Deli Serdang	Sampel 12
13	Kabupaten Langkat	Sampel 13
14	Kabupaten Nias Selatan	Sampel 14
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sampel 15
16	Kabupaten PakPak Barat	Sampel 16
17	Kabupaten Samosir	Sampel 17
18	Kabupaten Serdang Berdagai	Sampel 18
19	Kabupaten Batu bara	Sampel 19
20	Kabupaten Padang lawas utara	Sampel 20
21	Kabupaten Padang lawas	Sampel 21
22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Sampel 22
23	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Sampel 23
24	Kabupaten Nias Utara	Sampel 24
25	Kabupaten Nias Barat	Sampel 25
26	Kabupaten Sibolga	Sampel 26
27	Kota Tanjung Balai	Sampel 27
28	Kota Pematang Siantar	Sampel 28
29	Kota Tebing Tinggi	Sampel 29
30	Kota Binjai	Sampel 30
31	Kota Medan	Sampel 31
32	Kota Padang Sidempuan	Sampel 32
33	Kota Gunung sitoli	Sampel 33

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya”. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa hasil dari laporan Realisasi Kabupaten/Kota di 33 Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data yang di posting dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. [www.Pemprovsu.go.id](http://www.Pemprovsu.go.id).

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **3.6.1 Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti profil perusahaan, sktruktur organisasi dan dokumen lainnya. Serta mempelajari buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan media lainnya yang terkait dengan apa yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah data yang diperlukan sudah diperoleh secara lengkap guna untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisisregresi linier sederhana dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan menggunakan ulasan atau interpretasi terhadap data yang telah diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Berikut Langkah-langkahnya:

### **3.7.1 Uji Statistik Deskriptif**

“statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.Sugiyono (2014:207).

### **3.7.2 Metode Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Sederhana (Single Regression), dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y=a+bx+e$$

Keterangan:

a : adalah intercept atau konstansta

Y : adalah Belanja Daerah

X : adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

b : adalah koefisien regresi atau slope

e : adalah residual atau error

### **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.3.1 Uji Asumsi Multikolinieritas**

Pedoman model regresi yang bebas multikolinieritas, adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai angka tolerance mendekati angka 1.

- 2) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1.

### 3.7.3.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPERD) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dalam sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y.PRED - Y$  sesungguhnya) yang telah *distudentized* analisisnya.

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada dan membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.3.3 Uji Normalitas

Gozali (2005:105), tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Maka regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal.

Cara melihat *probability* plot yang membandingkan kumulatif dari dostribusi normal, distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, apabila distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya.

### 3.7.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) Ghozali (2013:110). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Durbin-waston* (DW test), dikarenakan sampel yang digunakan dibawah 100. Sedangkan jika sampel diatas 100 maka harus menggunakan pendekatan *Lagrange* (*LM test*). Uji *Durbin-woston* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel lagi diantara variabel independen. Ghozali,(2013:111).

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis dapat meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji  $t$  (uji signifikansi parameter individual/parsial). Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima menurut Ghozali (2013).

### 3.7.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk melihat berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas, dengan melihat nilai *adjusted R Square*. Koefisien determinasi

digunakan karena dapat menjelaskan kemampuan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen Ghozali,(2013:97).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara**

###### **4.1.1.1 Sejarah Ringkas**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.

Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

#### **4.1.1.2 Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023**

##### 1) Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

##### 2) Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- c) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,

kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- d) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab

#### **4.1.1.3 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara**

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

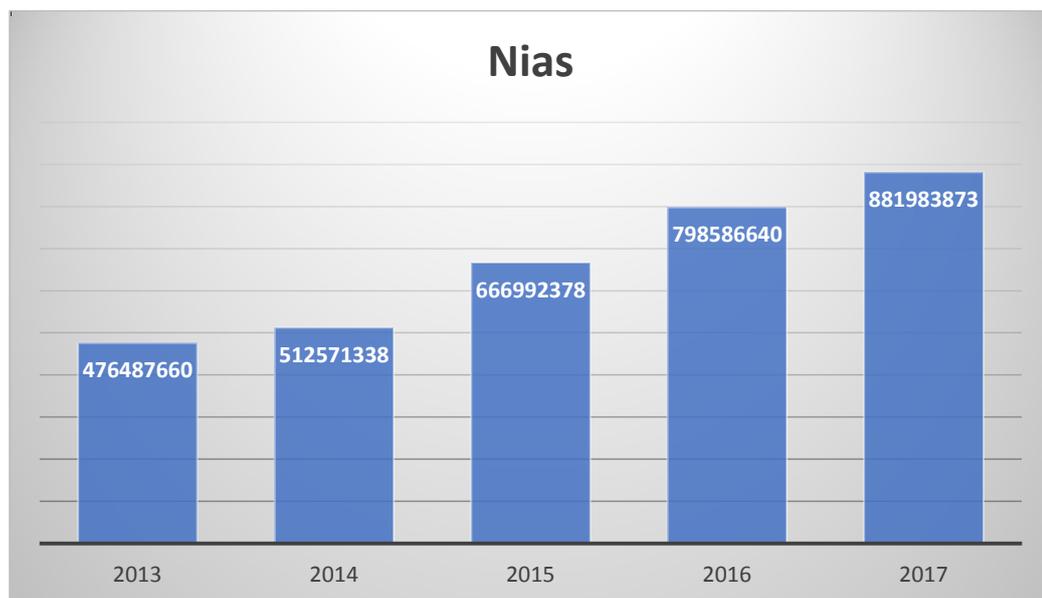
#### **4.1.2 Data Penelitian**

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ( PAD) ,Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang sah dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2017, sehingga jumlah sample menjadi 165. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Medan,metode penelitian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan model regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel.

### 4.1.3 Uji Statistik Deskriptif

#### 1) Kabupaten Nias

Pada grafik di bawah tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten nias sebesar Rp 476.487.660; naik menjadi Rp 881983873; di tahun 2017.



**Gambar 4.1 Kabupaten Nias**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 770.421.389; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 463.186.326; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 631.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten nias nilai rata-rata sebesar Rp 667.300.000.dan belanja yang paling besar adalah belanja tidak langsung belanja pegawai. Artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, jadi dapat dianggap mampu.

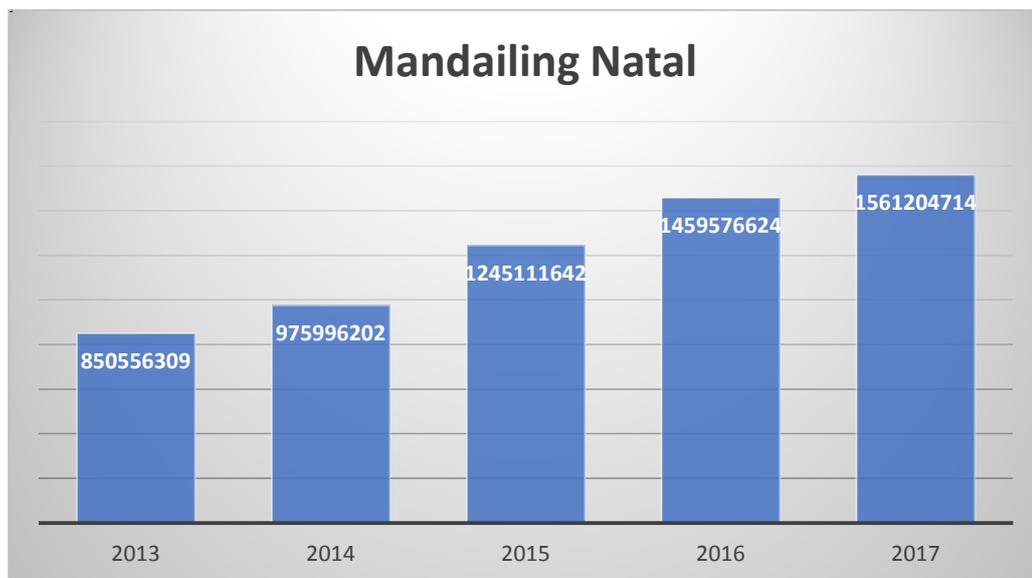
Tabel 4.1 Kabupaten Nias

<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Nias	5	463186328	770421389	6.31E8
Belanja Daerah Nias	5	476487660	881983873	6.67E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber :Hasil Pengolahan SPSS versi 19

## 2) Kabupaten Mandailing Natal

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten mandailing natal dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah mandailing natal sebesar Rp.850.556.309; naik Rp.1.561.204.714; di tahun 2017.



**Gambar 4.2 Kabupaten Mandailing Natal**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp.1.561.204.714; sedangkan Belanja Daerah Minimum sebesar Rp 850.556.309; dengan rata-rata jumlah Belanja Daerah untuk kabupaten mandailing Natal dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp

122.000.000.000; Jika di bandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten Mandailing Natal nilai rata-rata sebesar Rp 103.000.000.000; dan belanja yang paling dominan di tahun 2017 adalah belanja tidak langsung belanja pegawai artinya besaran antara Belanja dengan rasio Kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti Kabupaten Mandailing Natal dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.2 Kabupaten Mandailing Natal

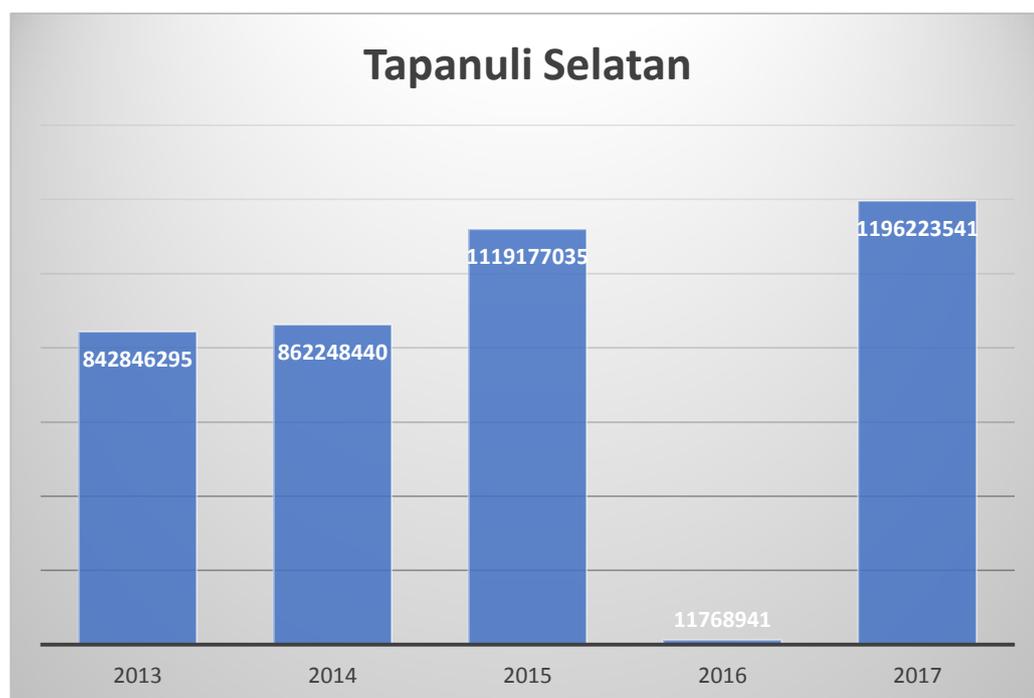
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Mandailing Natal	5	870952264	1153290706	1.03E9
Belanja Daerah Mandailing Natal	5	850556309	1561204714	1.22E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber :Hasil Pengolahan SPSS versi 19

3) Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada grafik di bawah tampak kabupaten mandailing natal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah sebesar Rp.842.846.295; naik menjadi Rp.1.196.223.543 ditahun 2017;



**Gambar 4.3 Kabupaten Tapanuli Selatan**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel dibawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.196.223.541; sedangkan belanja minimum sebesar Rp 11.768.941; dengan rata-rata jumlah Belanja Daerah untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp 80.600.000.000; jika di bandingkan dengan nilai Kemandirian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan nilai rata-rata sebesar Rp 86.700.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.3 Kabupaten Tapanuli Selatan

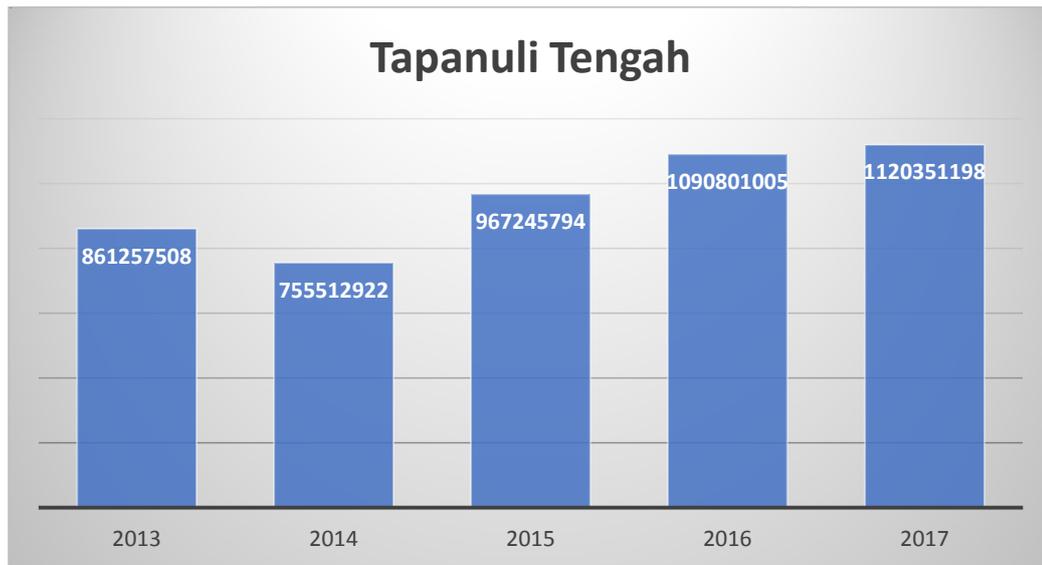
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Tapanuli Selatan	5	686506253	1033164187	8.67E8
Belanja Daerah Tapanuli Selatan	5	11768941	1196223541	8.06E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 19

4) Tapanuli Tengah

Pada grafik dibawah ini menjelaskan bahwa jumlah Belanja Daerah Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah dari Tahun 2013 hingga sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Pada awal Tahun 2013 Belanja Daerah pada Kabupaten Tapanuli Tengah Sebesar Rp. 861.257.508; dan terus mengalami kenaikan menjadi Rp 1.120.351.198 ditahun 2017.



**Gambar 4.4 Kabupaten Tapanuli Tengah**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.120.351.198; sedangkan belanja minimum sebesar Rp 755.512.922; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten tapanuli tengah 95.900.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten tapanuli tengah nilai rata-rata Rp 83.200.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya, berarti kabupaten tapanuli tengah dapat di anggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.4 Kabupaten Tapanuli Tengah

**Descriptive Statistics**

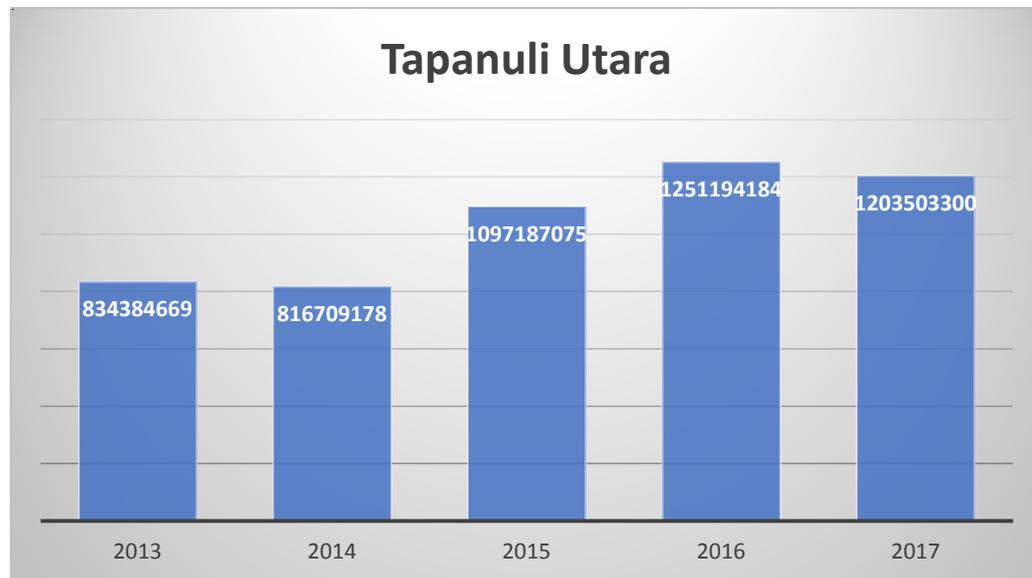
	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Tapanuli Tengah	632144532	977095501	8.32E8
Belanja Daerah Tapanuli Tengah	755512922	1120351198	9.59E8
Valid N (listwise)			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 19

5) Tapanuli Utara

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten tapanuli utara dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan.

Tahun 2013 belanja daerah kabupaten tapanuli utara sebesar Rp 834.384.669; naik menjadi Rp 834.384.669; naik menjadi Rp 1.203.503.300; ditahun 2017.



**Gambar 4.5 Kabupaten Tapanuli Utara**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja tertinggi yaitu sebesar Rp 1.251.194.184; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 816.709.178; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten tapanuli utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Rp 104.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten tapanuli utara nilai rata-rata sebesar Rp 87.100.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, artinya dapat dianggap mampu.

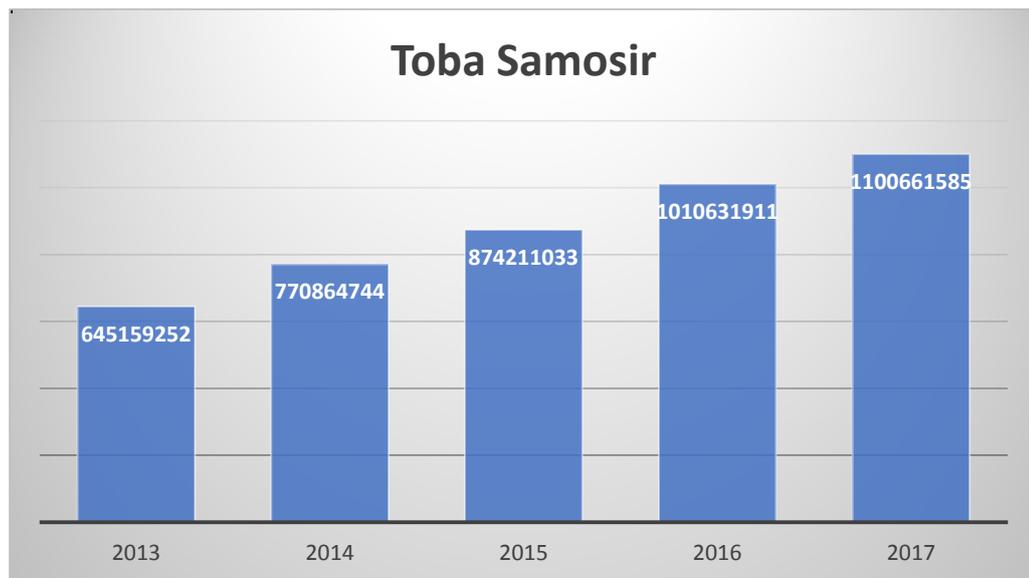
Tabel 4.5 Kabupaten Tapanuli Utara

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Tapanuli Utara	5	682598056	1082679342	8.71E8
Belanja Daerah Tapanuli Utara	5	816709178	1251194184	1.04E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 19

#### 6) Toba Samosir

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten toba samosir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten toba samosir sebesar Rp 645.159.252; naik menjadi Rp 1.100.661.585; di tahun 2017.



**Gambar 4.6 Kabupaten Toba Samosir**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum atau belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.100.661.585; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 645.159.252; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten toba samosir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 88.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten toba samosir nilai rata-rata sebesar Rp 68.400.000.000 dan belanja yang paling dominan adalah belanja langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten toba samosir dapat di anggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

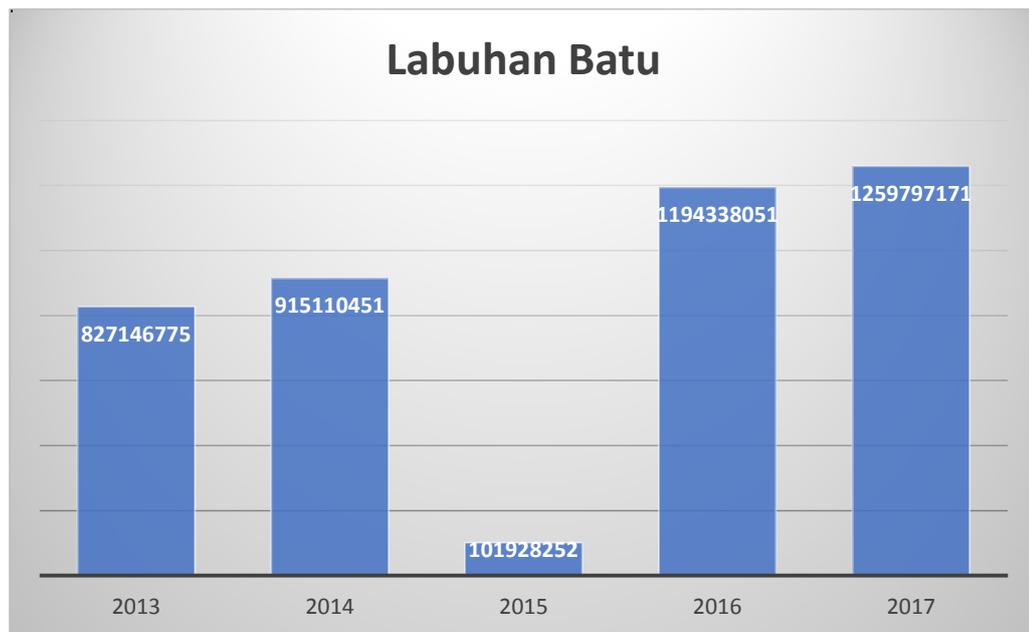
Tabel 4.6 Kabupaten Toba Samosir  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Toba Samosir	5	523972792	828854682	6.84E8
Belanja Daerah Toba Samosir	5	645159252	1100661585	8.80E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 19

#### 7) Labuhan Batu

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah kabupaten labuhan batu dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terus meningkat. Tahun 2013 belanja daerah sebesar Rp 827.146.775; naik menjadi Rp 1.259.797.171; di tahun 2017.



**Gambar 4.7 Kabupaten Labuhan Batu**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel dibawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.259.797.171; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 827.146.775; dengan rata- rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten labuhan batu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp

86.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten labuhan batu nilai rata-rata sebesar Rp 93.500.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten labuhan batu dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

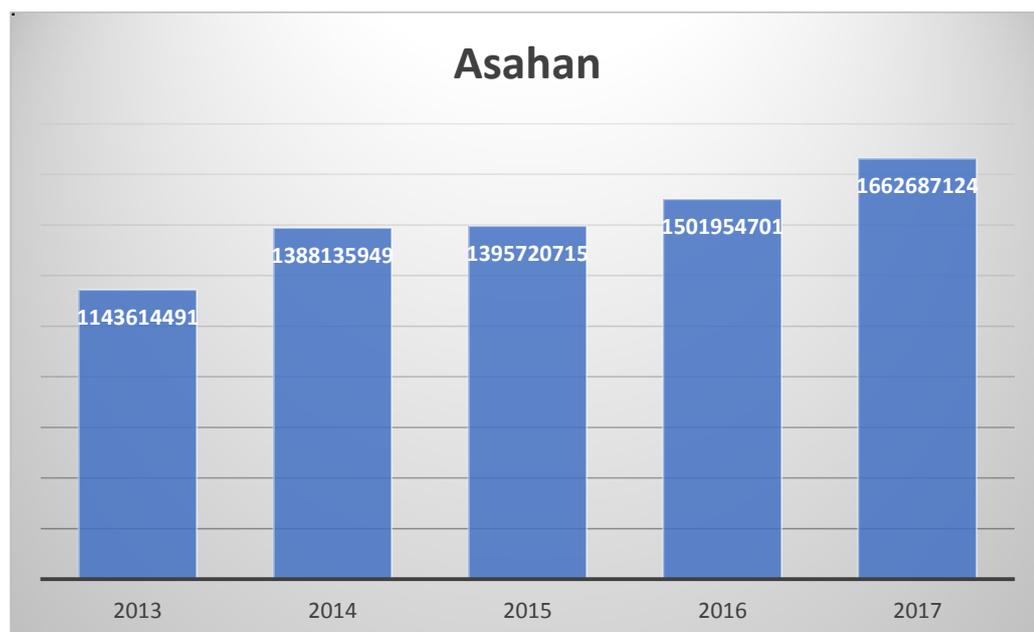
Tabel 4.7 Kabupaten Labuhan Batu

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Labuhan Batu	5	675718540	1210184140	9.35E8
Belanja Daerah labuhan Batu	5	101928252	1259797171	8.60E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

8) Asahan

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten asahan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten asahan sebesar Rp 1.143.614.491; naik menjadi Rp1.662.687.124; di tahun 2017.



Gambar 4.8 Kabupaten Asahan

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.662.687.124; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 1.143.614.491; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten asahan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 142.000.000.000 jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten asahan nilai rata-rata sebesar Rp 117.000.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten asahan dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.8 Kabupaten Asahan

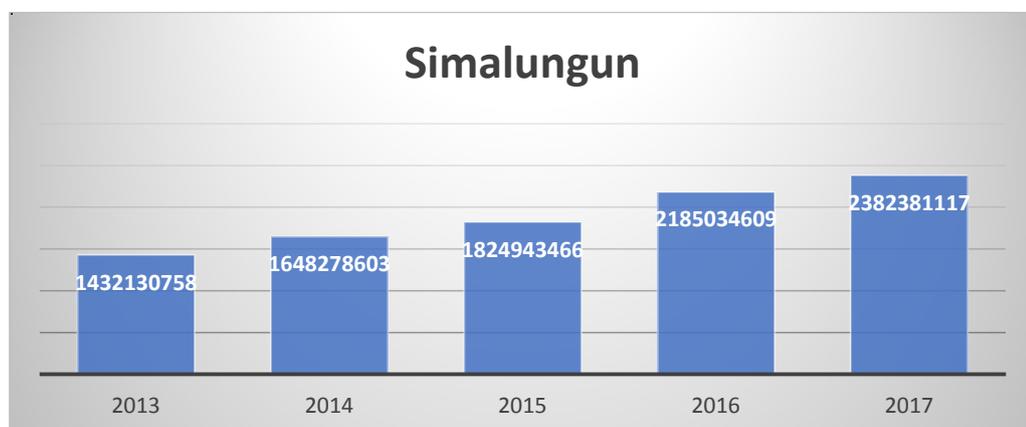
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Asahan	5	949921571	1382648011	1.17E9
Belanja Daerah Asahan	5	1143614491	1662687124	1.42E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

9) Simalungun

tampak Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten simalungun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten simalungun sebesar Rp 1.432.130.758; naik menjadi Rp 2.382.381.117; di tahun 2017.



**Gambar 4.9 Kabupaten Simalungun**

Sumber :Hasil Pengolahan Data(2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 2.382.381.117; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 1.432.130.758; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten simalungun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp 189.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten simalungun nilai rata-rata sebesar Rp 157.000.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya jumlahnya, berarti kabupaten simalungun dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.9 Kabupaten Simalungun

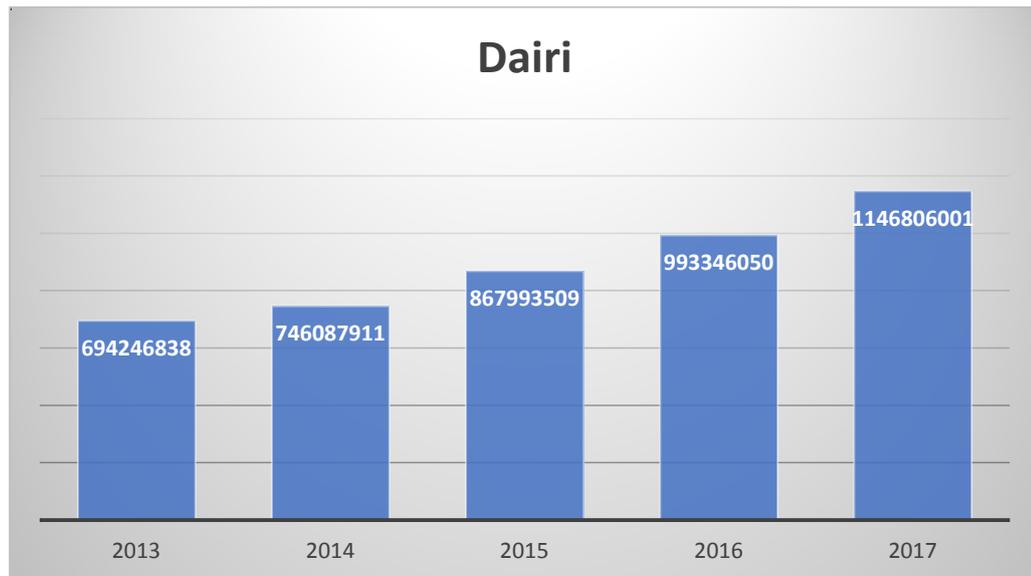
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Simalungun	5	1254649580	2049585557	1.57E9
Belanja Daerah Simalungun	5	1432130758	2382381117	1.89E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

10) Dairi

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten dairi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten dairi sebesar Rp 694.246.838 naik menjadi Rp 1.146.806.001 ditahun 2017.



**Gambar 4.10 Kabupaten Dairi**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilaimaksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.146.806.001; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 694.246.838; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten dairi dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp 89.0000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten dairi nilai rata-rata sebesar Rp 221.000.000.000 dan belanja paling dominan ditahun 2017 adalah belanja langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja daerah jika dibandingkan dengan rasio kemandirian keuangan daerah hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten dairi dapat dianggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya sendiri.

Tabel 4.10 Kabupaten Dairi

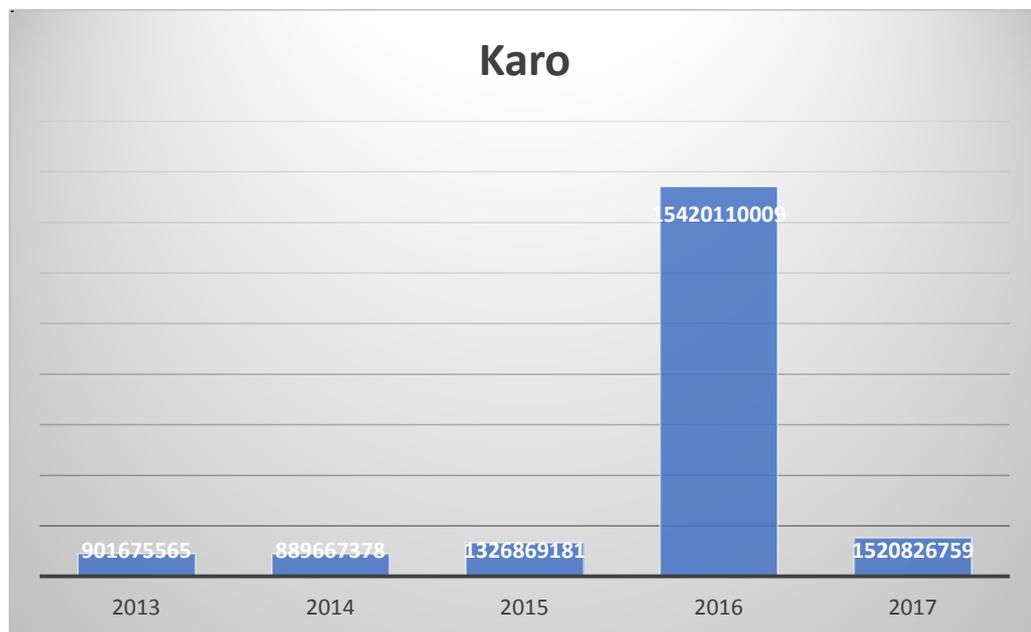
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Dairi	5	636340129	8017759368	2.21E9
Belanja Daerah Dairi	5	694246838	1146806001	8.90E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 19

## 11) Karo

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten Karo dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten karo sebesar Rp 901.675.565; sebesar naik menjadi Rp 1.520.826.759 di tahun 2017.



**Gambar 4.11 Kabupaten Karo**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.520.826.759; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 901.675.565; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten karo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 401.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten karo nilai rata-rata sebesar Rp 99.600.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian berbeda jauh jumlahnya, berarti kabupaten karo dapat dianggap belum mampu untuk membiayai besar kebutuhan daerahnya.

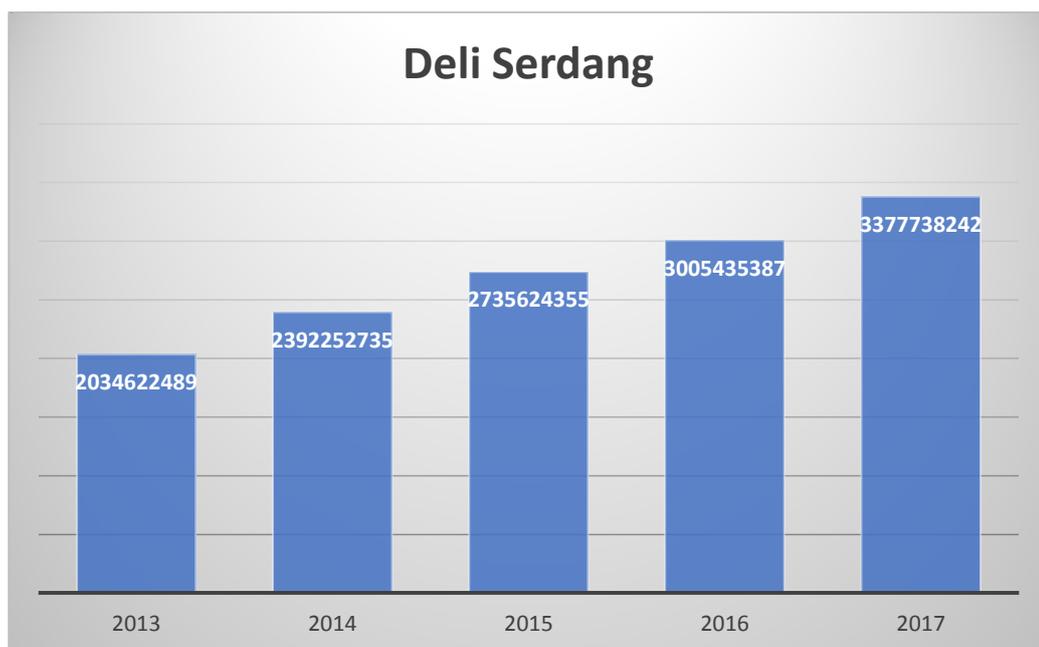
Tabel 4.11 Kabupaten Karo  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Karo	5	757129612	1213803930	9.96E8
Belanja Daerah Karo	5	889667378	1542011000	4.01E9
Valid N (listwise)	5		9	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 12) Deli Serdang

Pada grafik di bawah tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten deli serdang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten deli serdang sebesar Rp 2.034.622.489 naik menjadi Rp 3.377.738.242 di tahun 2017.



**Gambar 4.12 Kabupaten Deli Serdang**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 3.377.738.242; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 2.034.622.489; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten deli serdang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp

271.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten deli serdang nilai rata-rata sebesar Rp 430.000.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten deli serdang dapat dianggap tidak mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.12 Kabupaten Deli Serdang

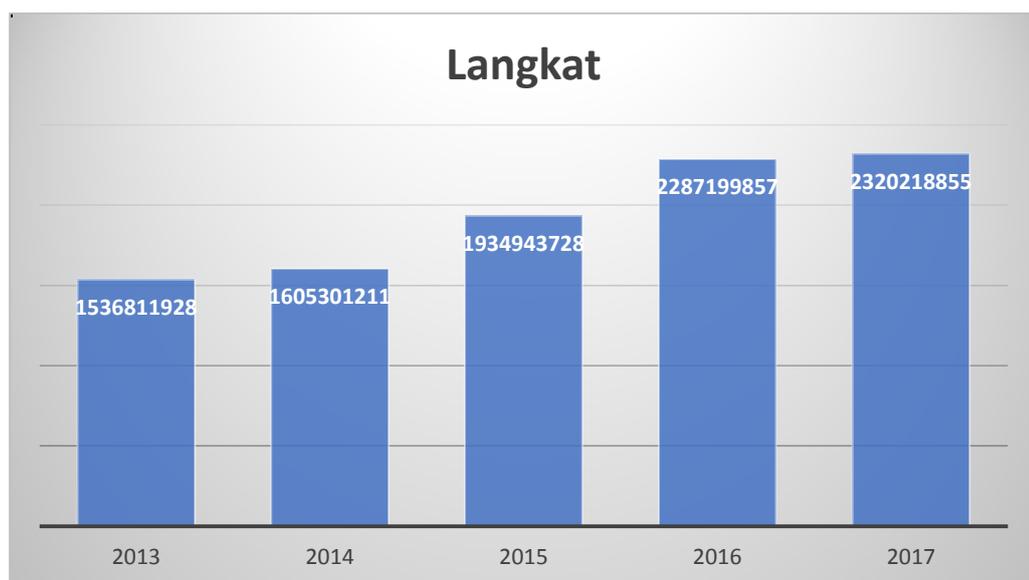
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Deli Serdang	5	1745190613	12095513194	4.30E9
Belanja Daerah Deli Serdang	5	2034622489	3377738242	2.71E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS.

13) Langkat

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten langkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten langkat sebesar Rp 1.536.811.928; naik menjadi Rp 2.320.218.855; di tahun 2017.



**Gambar 4.13 Kabupaten Langkat**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 2.320.218.855; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 1.536.811.928; Dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten langkat dari tahun Rp 194.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten langkat nilai rata-rata sebesar Rp 164.000.000.000 ; dan belanja yang dominan terdapat ditahun 2017 yaitu belanja langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten langkat dapat dianggap tidak mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.13 Kabupaten Langkat

<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Langkat	5	1308048273	1969330389	1.64E9
Belanja Daerah Langkat	5	1536811928	2320218855	1.94E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 14) Nias Selatan

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten nias selatan sebesar Rp 871.660.788; naik menjadi Rp 1.066.164.746; di tahun 2017.



**Gambar 4.14 Kabupaten Nias Selatan**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.066.164.746; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 871.660.788; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 86.400.000.000; jika di bandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten nias selatan nilai rata-rata sebesar Rp 70.800.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya jumlahnya, berarti kabupaten nias selatan dapat dianggap tidak mampu untuk membiayai daerahnya.

Tabel 4.14 Kabupaten Nias Selatan

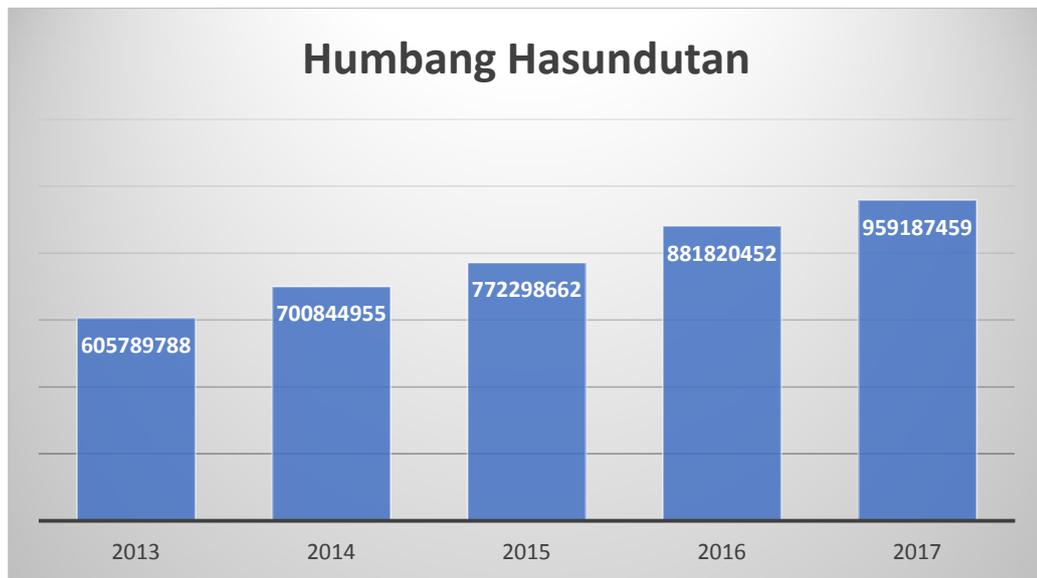
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Nias Selatan	5	601685147	798139039	7.08E8
Belanja Daerah Nias Selatan	5	719011176	1066164746	8.64E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

15) Humbang Hasundutan

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten humbang hasundutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten hasundutan sebesar Rp 605.789.788; naik menjadi Rp 959.187.459; di tahun 2017.



**Gambar 4.15 Kabupaten Humbang Hasundutan**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 959.187.459; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 605.789.788; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten humbang hasundutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 78.400.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten humbang hasundutan nilai rata-rata sebesar Rp 69.100.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten humbang hasundutan dapat dianggap tidak mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.15 Kabupaten Humbang Hasundutan

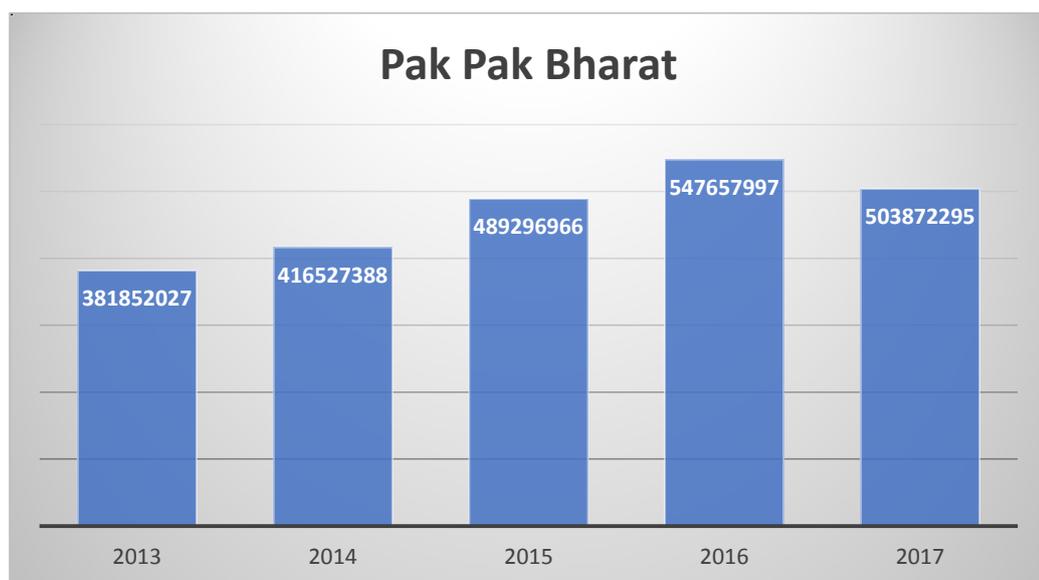
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Humbang Hasundutan	5	542338223	871557188	6.91E8
Belanja Daerah Humbang Hasundutan	5	605789788	959187459	7.84E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

## 16) Pak Pak Bharat

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten pak pak bharat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten pak pak bharat sebesar Rp 381.852.027; naik menjadi Rp 503.872.295; ditahun 2017.

**Gambar 4.16 Kabupaten Pak Pak Bharat**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp Rp 547.657.997; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 381.852.027; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten pak pak bharat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017

sebesar Rp 46.800.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten pak pak bharat nilai rata-rata sebesar Rp 43.400.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten pak pak bharat dapat di anggap mampu untuk membiayi sebagian besar kebutuhan daerahnya.

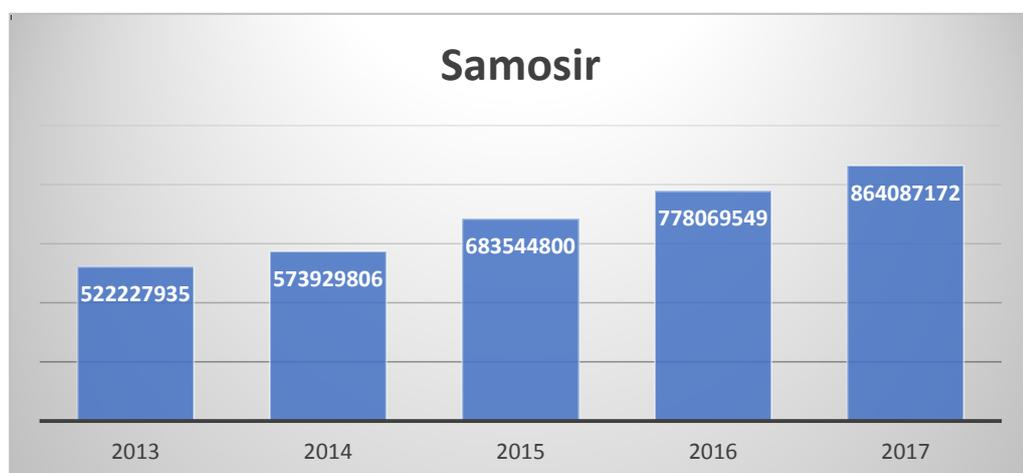
Tabel 4.16 Kabupaten Pak Pak Bharat  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Pak Pak Bharat	5	363695414	476285351	4.34E8
Belanja Daerah Pak Pak Bharat	5	381852027	547657997	4.68E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 17) Samosir

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten samosir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten samosir sebesar Rp 522.227.935; naik menjadi Rp 864.087.172; ditahun 2017.



**Gambar 4.17 kabupaten Samosir**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu Rp 864.087.172; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 522.227.935; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten samosir dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp 68.400.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten samosir nilai rata-rata sebesar Rp 60.800.000.000; artinya besarn antara belnja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten samosir dapat dianggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.17 Kabupaten Samosir

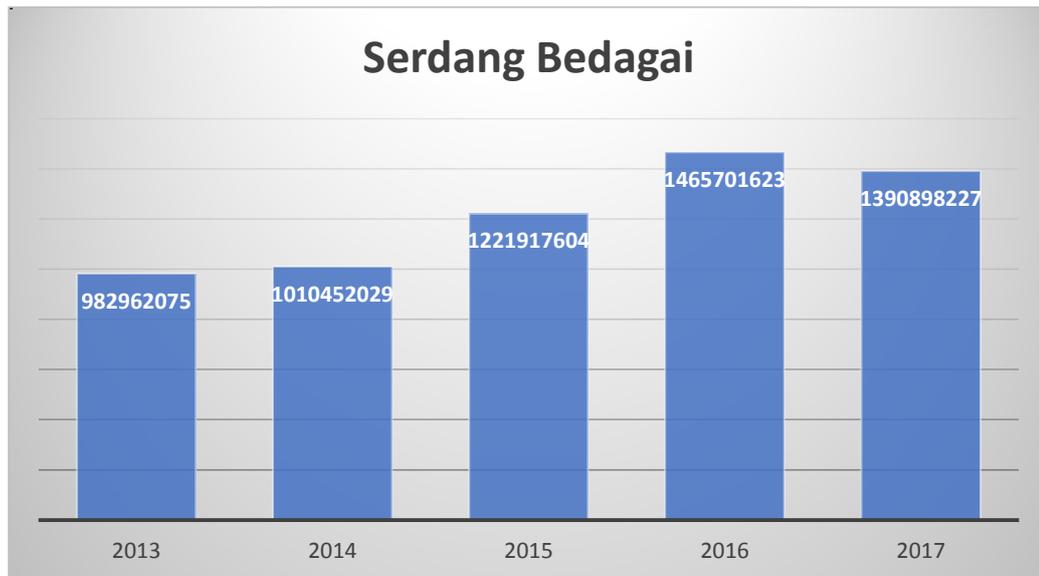
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Samosir	5	477558184	757694558	6.08E8
Belanja Daerah Samosir	5	522227935	864087172	6.84E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

18) Serdang Bedagai

Pada grafik dibawah ini tampak belanja daerah untuk kabupaten serdang bedagai dari tahun 2013 sampai denga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten serdang bedagai sebesar Rp 982.962.075; naik sebesar Rp 1.390.898.227; ditahun 2017.



**Gambar 4.18 Kabupaten Serdang Bedagai**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.465.701.623; sedangkan belanja minimum sebesar Rp 982.962.075; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten serdang bedagai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 121.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten serdang bedagai nilai rata-rata sebesar Rp 101.000.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya jumlahnya, berarti kabupaten serdang bedagai dapat dianggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

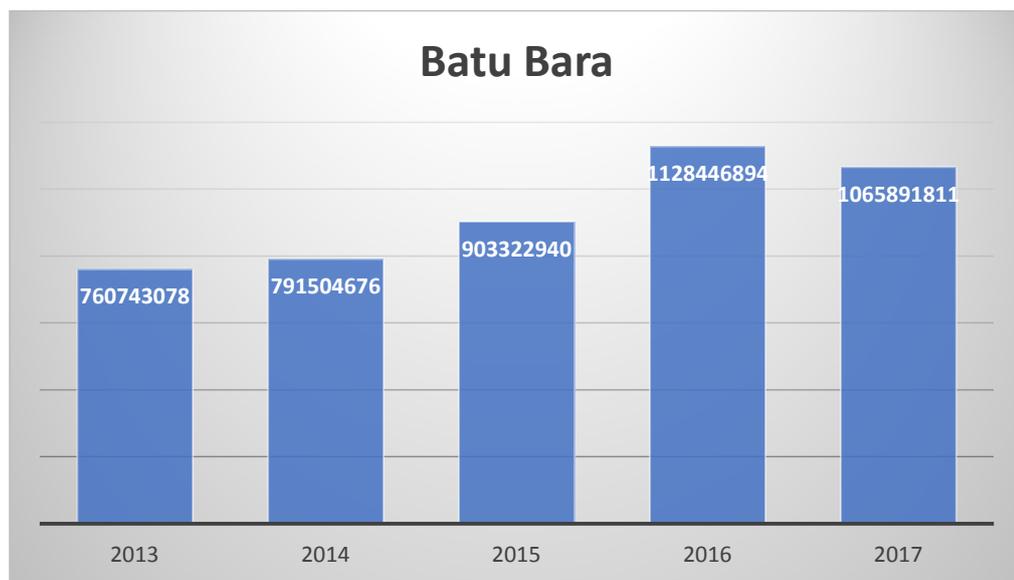
**Tabel 4.18 Kabupaten Serdang Bedagai  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Serdang Bedagai	5	798226216	1228326257	1.01E9
Belanja Daerah Serdang Bedagai	5	982962075	1465701623	1.21E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

### 19) Batu Bara

Pada grafik dibawah ini tampak bahwa jumlah belanja daerah untuk kabupaten batu bara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus megalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten batu bara sebesar Rp 760.743.078; naik menjadi Rp 1.065.891.811; di tahun 2017.



**Gambar 4.19 Kabupaten Batu Bara**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019).

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp1.128.446.894; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 760.743.078; dengan rata-rata jumlah belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 93.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten batu bara nilai rata-rata sebesar Rp 78.900.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten batu bara dapat dianggap mampu.

Tabel 4.19 Kabupaten Batu Bara

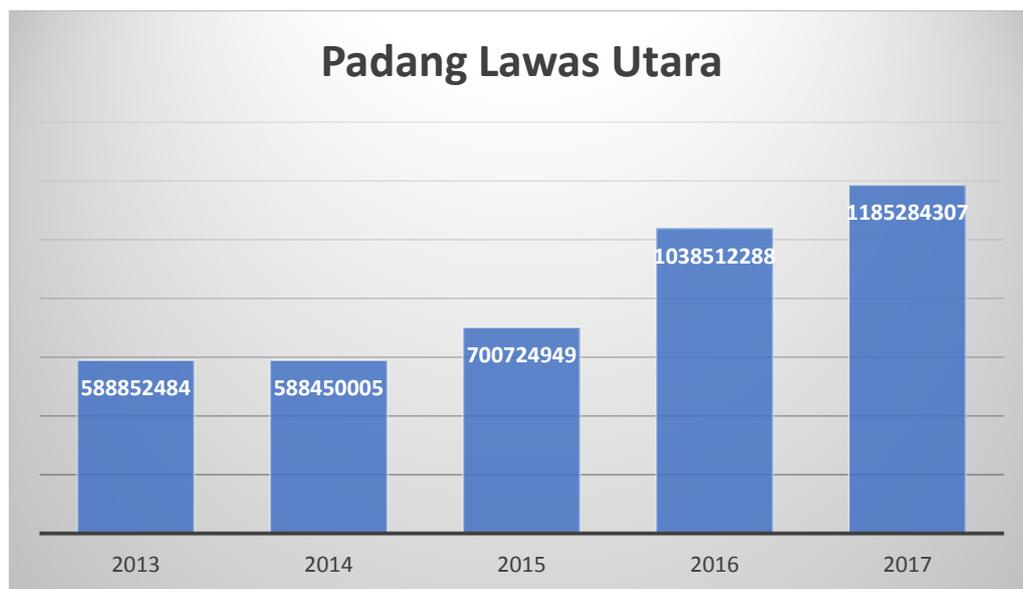
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Batu Bara	5	634772423	955261939	7.89E8
Belanja Daerah Batu Bara	5	760743078	1128446894	9.30E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

## 20) Padang Lawas Utara

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten padang lawas utara terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah sebesar Rp 588.852.484; naik menjadi Rp 1.185.284.307; di tahun 2017.

**Gambar 4.19 Kabupaten Batu Bara**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.185.284.307; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 588.450.005; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten padang lawas utara dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp

82.000.000.000; jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten padang lawas utara nilairata-rata sebesar Rp 63.100.000.000; artinya besaran antara belanja daerah dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten padang lawas utara dapat dianggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

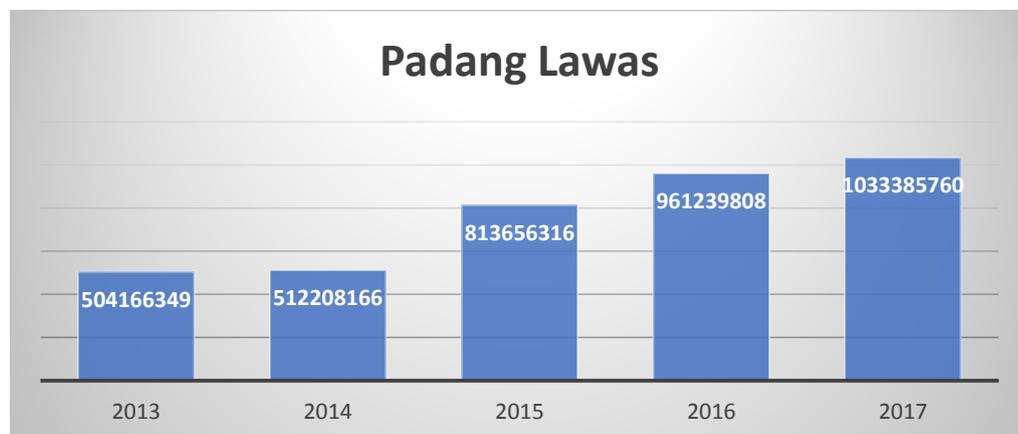
Tabel 4.20 Kabupaten Padang Lawas Utara

<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Padang Lawas Utara	5	473569815	831484466	6.31E8
Belanja Daerah Padang Lawas Utara	5	588450005	1185284307	8.20E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 21) Padang Lawas

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten padang lawas dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten padang lawas sebesar Rp 504.166.349; naik menjadi Rp 1.033.385.760; ditahun 2017.



Gambar 4.21 Kabupaten Padang Lawas

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019).

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 1.033.385.760; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 504.166.349; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten padang lawas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 76.500.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten padang lawas nilai rata-rata sebesar Rp 62.200.000.000 artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten padang lawas dapat dianggap mampu.

Tabel 4.21 Kabupaten Padang Lawas

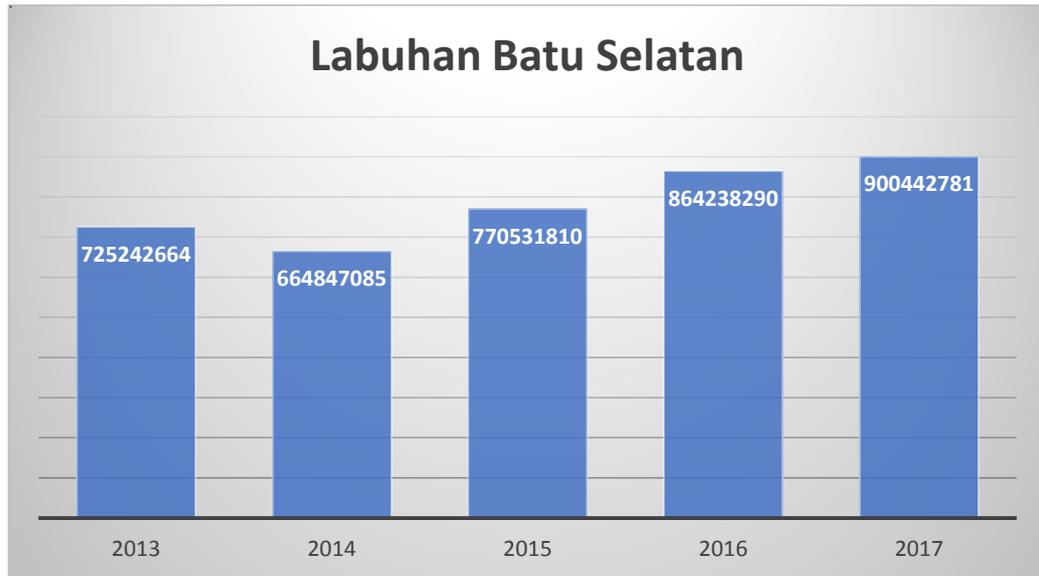
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Padang Lawas	5	471239532	772374511	6.22E8
Belanja Daerah Padang Lawas	5	504166349	1033385760	7.65E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

22) Labuhan Batu Selatan

Pada grafik di bawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten labuhan batu utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten labuhan batu selatan sebesar Rp 725.242.664; naik menjadi Rp 900.442.781; ditahun 2017.



**Gambar 4.22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel dibawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 900.442.781; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 664.847.085; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten labuhan batu selatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 78.500.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten labuhan batu selatan nilai rata-rata sebesar Rp 67.700.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya.

**Tabel 4.22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Labuhan Batu Selatan	5	546663107	829910935	6.77E8
Belanja Daerah Labuhan Batu Selatan	5	664847085	900442781	7.85E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

### 23) Labuhan Batu Utara

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten labuhan batu utara dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 Belanja Daerah Kabupaten labuhan batu utara sebesar Rp 766.421.207; naik menjadi Rp 984.471.800 ; di tahun 2017.



**Gambar 4.23 Kabupaten Labuhan Batu Utara**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 984.471.800; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 755.766.389; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten labuhan batu utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 86.900.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten labuhan batu utara nilai rata-rata sebesar Rp 73.600.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya jumlahnya, berarti kabupaten labuhan batu utara dapat dianggap tidak mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya sendiri.

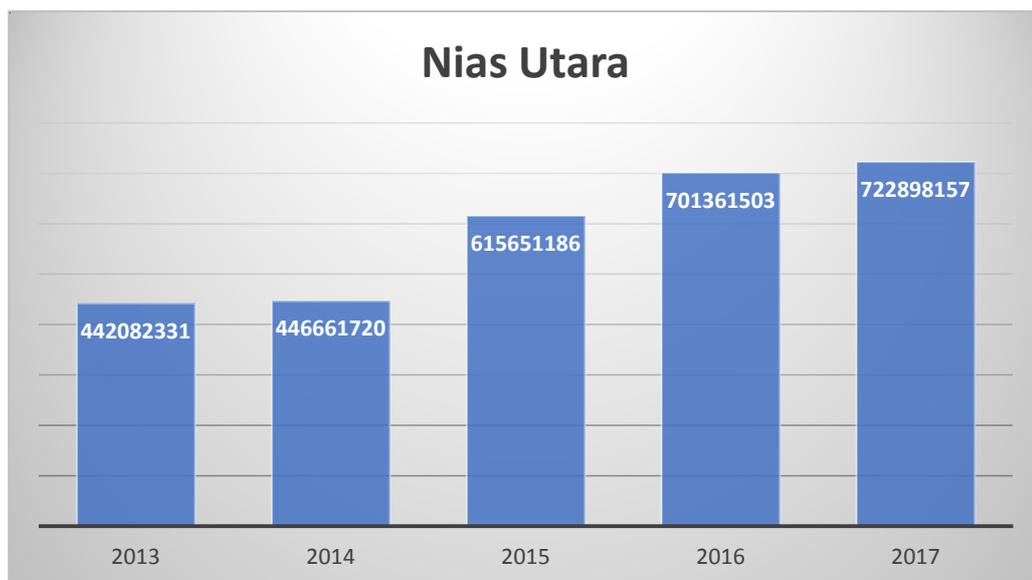
Tabel 4.23 Kabupaten Labuhan Batu Utara  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Labuhan Batu Utara	5	572705218	911015169	7.36E8
Belanja Daerah Labuhan Batu Utara	5	755766389	984471800	8.69E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 24) Nias Utara

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten .nias utara terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten nias utara sebesar Rp 442.082.331; naik menjadi Rp 722.898.157; di tahun 2017.



**Gambar 4.24 Kabupaten Nias Utara**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp722.898.157; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 442.082.331; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 58.600.000.000;

Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten nias utara nilai rata-rata sebesar Rp 41.400.000.000 artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besarnya, berarti kabupaten nias utara dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

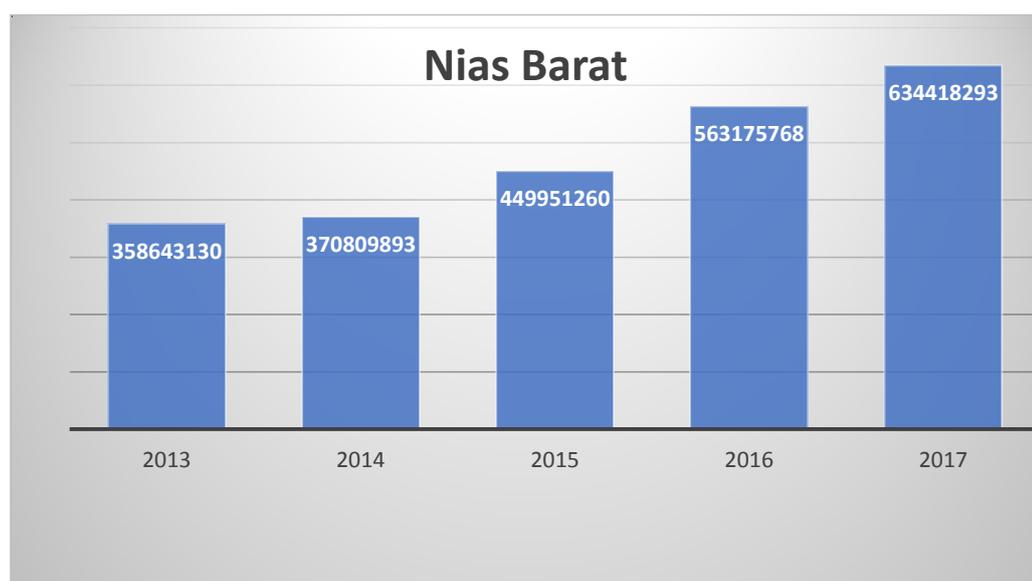
Tabel 4.24 Kabupaten Nias Utara  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Nias Utara	5	91429447	602117267	4.14E8
Belanja Daerah Nias Utara	5	442082331	722898157	5.86E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

#### 25) Nias barat

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias barat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Di Tahun 2013 belanja daerah kabupaten nias barat sebesar Rp 358.643.130; dan naik menjadi Rp 634.418.293; di tahun 2017.



Gambar: 4.25 Kabupaten Nias Barat

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 634.418.293; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 358.643.130; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten nias barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 47.500.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten nias barat nilai rata-rata sebesar Rp 47.500.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, kabupaten nias barat dapat dianggap mampu.

Tabel 4.25 Kabupaten Nias Barat

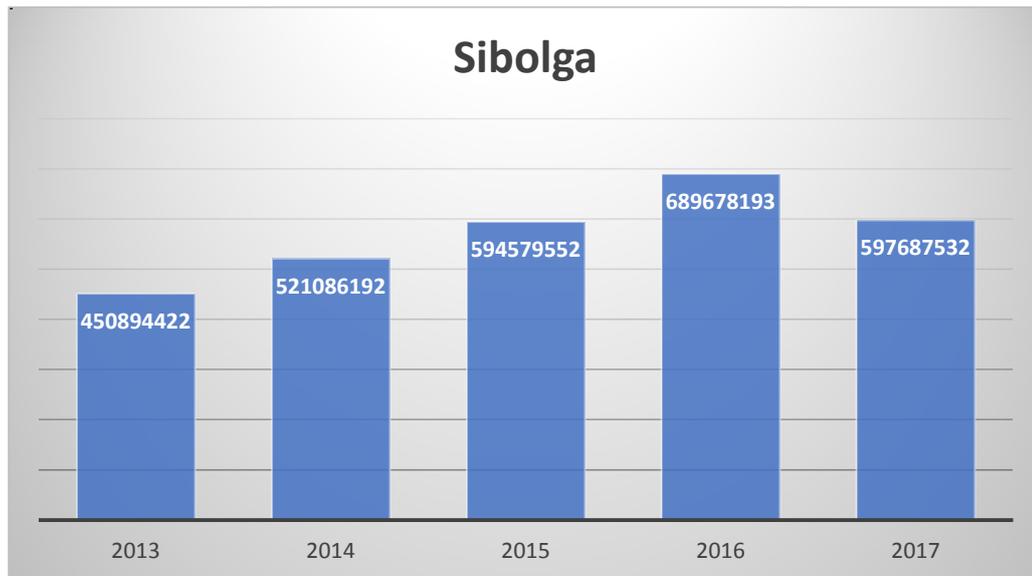
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Nias Barat	5	264046155	901609134	4.79E8
Belanja Daerah Nias Barat	5	358643130	634418293	4.75E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

26) Sibolga

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten sibolga dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten sibolga sebesar Rp 450.894.422; naik menjadi Rp 597.687.532; di tahun 2017.



**Gambar 4.26 Kota Sibolga**

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 689.678.193; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 450.894.422; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten sibolga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 57.100.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten sibolga nilai rata-rata sebesar Rp 55.900.000.000; dan belanja paling dominan terdapat di tahun 2016 belanja tidak langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kota sibolga dapat dianggap mampu membiayai kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.26 Kota Sibolga

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Sibolga	5	421723919	687141275	5.59E8
Belanja Daerah Sibolga	5	450894422	689678193	5.71E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

## 27) Kota Tanjung Balai

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten tanjung balai mengalami fluktuasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten tanjung balai sebesar Rp 465.491.830; naik menjadi Rp 644.010.084; di tahun 2017.



**Gambar 4.27 Kota Tanjung Balai**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 668.443.396; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 465.491.830; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten tanjung balai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 60.500.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten tanjung balai nilai rata-rata sebesar Rp 53.700.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kota tanjung balai dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.27 Kota Tanjung Balai

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Tanjung Balai	5	458558677	636756350	5.37E8
Belanja Daerah Tanjung Balai	5	465491830	668443396	6.05E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS.

## 28) Kota Pematang Siantar

Pada grafik dibawah ini menjelaskan belanja daerah meningkat setiap Tahun 2013 belanja daerah kota pematang siantar Sebesar Rp 741.073.262; naik menjadi Rp 894.444.774; di tahun 2017.

**Gambar 4.28 Kota Pematang Siantar**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 940.116.287; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 741.073.262; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten pematang siantar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 84.700.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten

pematang siantar nilai rata-rata sebesar Rp 75.000.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kota pematang siantar dapat dianggap belum mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.28 Kota Pematang Siantar

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Pematang Siantar	5	626319439	926534195	7.50E8
Belanja Daerah Pematang Siantar	5	741073262	940116287	8.47E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS.

29) Kota Tebing Tinggi

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten tebing tinggi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten tebing tinggi Sebesar Rp584.572.436;naik menjadi Rp 699.043.052; di tahun 2017.



Gambar 4.29 Kota tebing Tinggi

Sumber :Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 760.702.935;sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 584.572.436; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten tebing tinggi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 66.500.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten tebing tinggi nilai rata-rata sebesar Rp 62.100.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kota tebing tinggi dapat dianggap mampu.

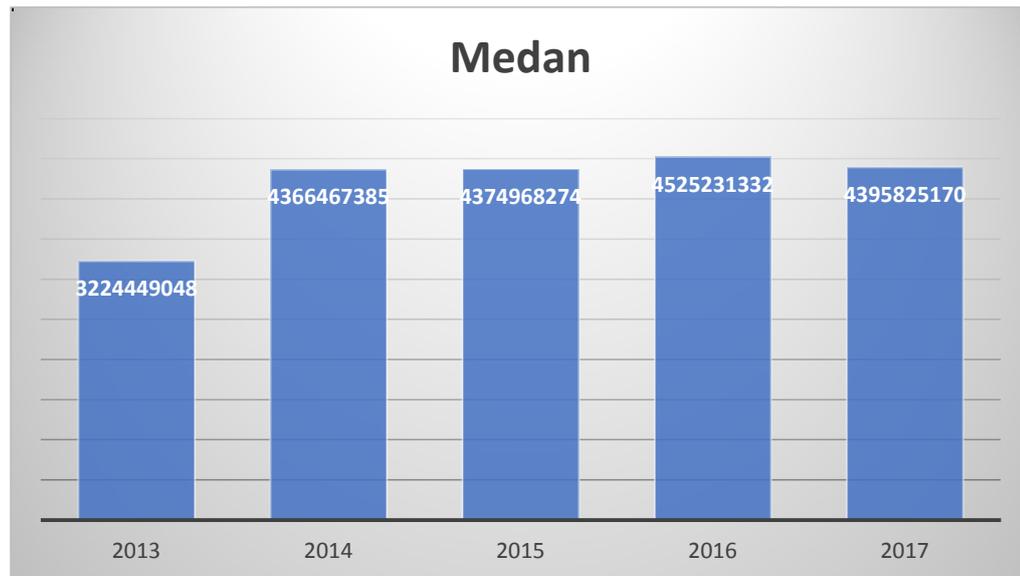
Tabel 4.29 Kota Tebing Tinggi

<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Tebing Tinggi	5	504049596	744601852	6.21E8
Belanja Daerah Tebing Tinggi	5	584572436	760702935	6.65E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

### 30) Kota Medan

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kota medan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami fluktuasi. Tahun 2013 belanja daerah kota medan Sebesar Rp 3.224.449.048; naik menjadi Rp 4.395.825.170; di tahun 2017.



**Gambar 4.30 Kota Medan**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 4.525.231.332; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 3.224.449.048; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kota medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 418.000.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kota medan nilai rata-rata sebesar Rp 543.000.000.000; dan belanja yang paling dominan terdapat ditahun 2016 yaitu belanja tidak langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya.

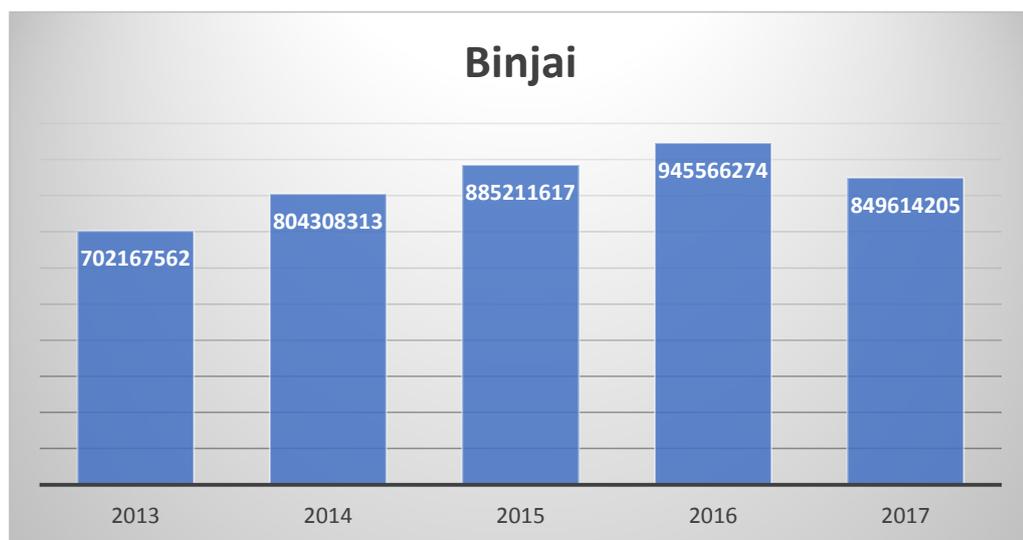
**Tabel 4.30 Kota Medan  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Medan	5	2839345648	13721628389	5.43E9
Belanja Daerah Medan	5	3224449048	4525231332	4.18E9
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

### 31) Kota Binjai

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kota binjai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kota binjai sebesar Rp 702.167.562; naik menjadi Rp 849.614.205; di tahun 2017.



**Gambar 4.31 Kota Binjai**

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp945.566.274; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp702.167.562; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kota binjai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 83.700.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kota binjai nilai rata-rata sebesar Rp 75.300.000.000; artinya kota binjai dapat dianggap mampu untuk membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

Tabel 4.31 Kota Binjai  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Binjai	5	585976045	914037823	7.53E8
Belanja Daerah Binjai	5	702167562	945566274	8.37E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

### 32) Kota Padang Sidempuan

Pada grafik dibawah ini tampak jumlah belanja daerah untuk kabupaten sidempuan terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 belanja daerah kabupaten sidempuan sebesar Rp 614.899.498; naik menjadi Rp 833.862.861; di tahun 2017.



Gambar 4.32 Kota Padang Sidempuan

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 854.914.604; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 614.899.498; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten

padang sidempuan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp75.400.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten padang sidempuan nilai rata-rata sebesar Rp 66.900.000.000; artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti Kota padang sidempuan dapat dianggap mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya.

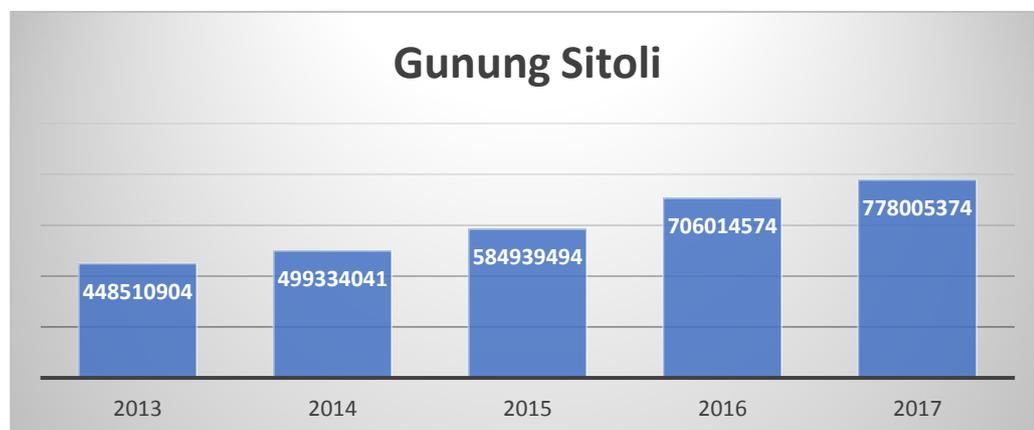
Tabel 4.32 Kota Padang Sidempuan  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Padang Sidempuan	5	527715300	850913996	6.69E8
Belanja Daerah Padang Sidempuan	5	614899498	854914604	7.54E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

### 33) Kota Gunung Sitoli

Pada grafik dibawah ini menjelaskan peningkatan belanja daerah yang terjadi di kota gunung sitoli terus mengalami kenaikan. Dilihat dari Tahun 2013 belanja daerah kabupaten gunung sitoli sebesar Rp 448.510.904; naik menjadi Rp 778.005.374; di tahun 2017.



Gambar 4.33 Kota Gunung Sitoli

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel di bawah ini tampak bahwa nilai maksimum dari belanja daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 778.005.374; sedangkan belanja daerah minimum sebesar Rp 448.510.904; dengan rata-rata jumlah belanja daerah untuk kabupaten gunung sitoli dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 60.300.000.000; Jika dibandingkan dengan nilai kemandirian daerah kabupaten gunung sitoli nilai rata-rata sebesar Rp 53.100.000.000 dan belanja paling dominan terdapat ditahun 2017 yaitu belanja tidak langsung belanja pegawai artinya besaran antara belanja dengan rasio kemandirian hampir sama besaran jumlahnya, berarti kabupaten gunung sitoli dapat dianggap mampu.

Tabel 4.33 Kota Gunung Sitoli  
**Descriptive Statistics**

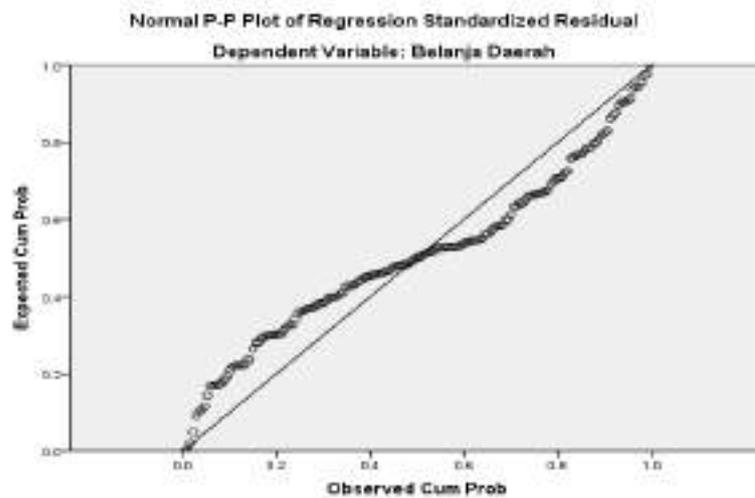
	N	Minimum	Maximum	Mean
Kemandirian Gunung Sitoli	5	416469642	658280697	5.31E8
Belanja Daerah Gunung Sitoli	5	448510904	778005374	6.03E8
Valid N (listwise)	5			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.

#### 4.1.4 Uji Asumsi Klasik

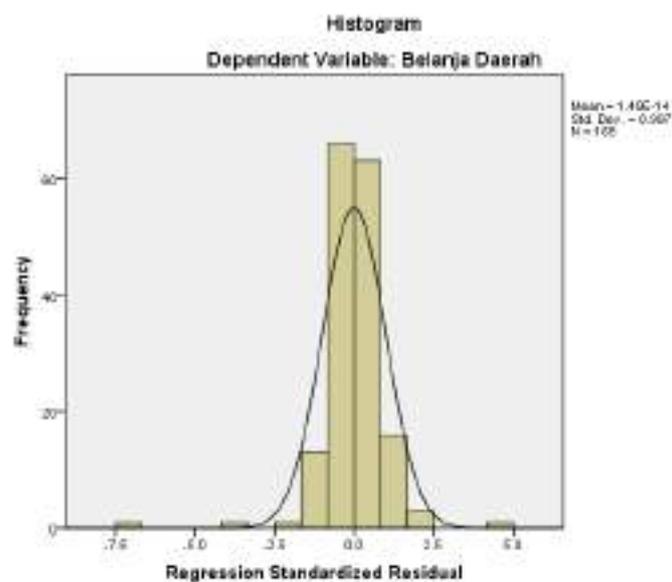
##### 4.1.4.1 Uji Normalitas.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Karena regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal.



**Gambar 4.34 Pp PLOT Uji Normalitas**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS.



**Gambar 4.35 Hasil Uji Histogram**

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS.

Dari grafik histogram dan pp plot dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menciung ke kiri maupun ke kanan, demikian pula hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik plot pada grafik normal plot terlihat titik-titik berada mengikuti arah garis diagonal demikian dapat disimpulkan data

penelitian dapat terdistribusi normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.1.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan cara melihat nilai *tolerance* dan VIF-nya. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, digunakan ketentuan sebagai berikut: jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10, maka terjadi masalah multikolinearitas.

Apabila VIF > 10, maka ada multikolinearitas.

Apabila VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas.

**Tabel 4.34 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant) Kemandirian Keuangan	1.000	1.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

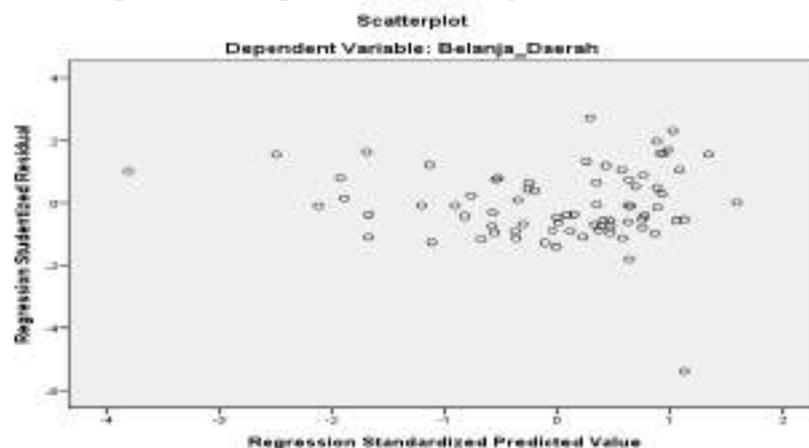
Berdasarkan hasil pengujian *collinearity statistics* pada tabel 4.34 Dapat di jelaskan sebagai berikut: Nilai *tolerance* dari Kemandirian keuangan daerah sebesar 1000 dan nilai VIF dari Kemandirian keuangan daerah sebesar 1.000 Sehingga hasil uji statistik nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0.10 dan demikian juga hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.

#### 4.1.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan. Jika varians residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, tetapi jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Mendeteksi apakah ada atau tidak gejala heterokedastisitas dapat dilakukan dengan hasil program SPSS dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika ada tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 4.36 Scatterplot Heterokedastisitas**

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Gambar 4.36 terlihat titik secara acak tidak membentuk pola tertentu yang jelas, secara tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu *Regression Studentized Residual* (Y). Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk

prediksi belanja daerah berdasarkan masukan variabel independennya (Kemandirian Keuangan Daerah).

#### 4.1.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  atau sebelumnya. Masalah autokorelasi pada umumnya terjadi pada regresi yang datanya *time series*.

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena data observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. (Ghozali, 2013:110) mengatakan bahwa Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

Setelah dilakukan uji statistik terhadap model regresi dalam bentuk linier, maka diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.606 dan berada pada daerah *No Autocorelation* yaitu diantara nilai 1 dan 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Ringkasan dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.35, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.35 Pengujian Autokorelasi**

/Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.442 <sup>a</sup>	.196	.191	.549747	1.606

a. Predictors: (Constant), kemandirian keuangan

b. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

#### 4.1.4.5 Analisis Regresi

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis linier Sederhana. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.36 Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.407	.057		359.520	.000
<sub>1</sub> Kemandirian Keuangan	1.912E-10	.000	.0442	6.299	.000

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi sederhana adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kemandirian Keuangan daerah terhadap belanja daerah berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresinya adalah

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \epsilon$$

$$Y = 20.407 + 0.442X + \epsilon$$

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 20.407 artinya jika variabel Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah bernilai sebesar 20.407.
- Nilai koefisien Beta untuk variabel Kemampuan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,442 artinya setiap kenaikan variabel kemampuan keuangan daerah akan meningkat sebesar 44,2% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

#### 4.1.5 Uji Hipotesis

##### 4.1.5.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji Pengaruh Parsial (uji t) digunakan untuk menguji secara parsial (individu) seberapa besar pengaruh variabel bebas (kemampuan keuangan daerah) terhadap variabel terikat (belanja daerah) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Untuk melakukan uji-t maka menggunakan Tabel *Coefficients* pada tabel 4.36. Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung kemampuan keuangan sebesar  $6,299 > 1,98$  ( $n-2 = 165-2 = 163$   $\alpha 5\%$ ) kemudian

nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dengan ini artinya kemampuan keuangan signifikan mempengaruhi belanja daerah.

#### 4.1.5.2 Pengujian Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian determinasi bertujuan mengetahui seberapa besar variabel bebas (rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah) menjelaskan variabel belanja daerah. Adapun hasil penelitian berdasarkan bantuan program SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.37 Model Summary<sup>b</sup>**

/Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.442 <sup>a</sup>	.196	.191	.549747	1.606

a. Predictors: (Constant), kemandirian keuangan

b. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS

Berdasarkan Tabel 4.37 diperoleh bahwa angka  $R$  0,442 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 44,2% belanja daerah dapat diperoleh dan dijelaskan oleh rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan sisanya adalah ( $100\% - 44,2\% = 55,8\%$ ) dijelaskan oleh pengaruh faktor lain atau variabel diluar model seperti seperti sisa lebih anggaran tahun sebelum nya, pajak daerah, retribusi daerah ,dana alokasi khusus, dan lain sebagainya.

#### 4.1.6 Pembahasan

##### 4.1.6.1 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa rasio kemandirian keuangan

daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian R. Agoes Kamaroellah (2017) yang menyatakan bahwa “Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah kabupaten pamekasan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan tingkat kemampuan daerah yang masih kurang”.

Hal ini sejalan dengan Purba (2010) yang menyatakan bahwa “kemampuan keuangan daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota Sumatera utara era otonomi daerah periode 2001 sampai dengan 2008 mempunyai pengaruh positif dan signifikan”.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahab (2016) yang menyatakan bahwa “kemampuan keuangan daerah kabupaten jayapura memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi”.

Hal ini dapat diartikan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah, karena rasio kemandirian keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten/Kota di Sumatera Utara belum memiliki porsi yang cukup untuk mempengaruhi belanja daerah. Ini disebabkan karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 Menunjukkan belum Mandiri .
- 2) Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran yang akan penulis ajukan untuk menjadi masukan:

- 1) Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan belanja langsung khususnya belanja daerah dengan lebih agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan asas otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan dan melampaui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sesuai sehingga diharapkan belanja daerah juga dapat teralokasi dengan lebih baik lagi.

- 2) Para Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih, 2012. “ *Pengaruh Good Governance Terhadap Tax Avoidance*”. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8, No. 2, Mei 2012, Hal : 123-136.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biomatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Ghozali, Imam, (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif*.
- Ghozali, Imam, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program Spss, Edisi 7*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Jumasi Purba (2010) “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Era Otonomi Daerah”.

- La Ode Abdul Wahab (2016) "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura".
- Mahmudi, 2010 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- R.Agoes kamaroellah (2017) "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan otonomi Daerah".
- Rusiadi, dkk. (2013). *Metoden Penelitian Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos dan Lisrel, Cetakan pertama. Usu Press. Medan.*
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Singkoh, Militia Christi. 2014. *Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Satuan Kerja BLU RSUP Prof. Dr R. D. Kandao Manado*. Manado. Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung-Alfabeta.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Wahyuni dan Adi, Priyono Hari 2009. "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)". Sumber *The 3rd National Conferences UKMWMS*. Page 1.Surabaya.
- Wijayanti, I. Priyadi, M.P 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.3, No.3
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.
- BPS.2014 *StatistikKeuanganPemerintah Daerah Sumatera Utara 2013-2014*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- BPS.2014 *StatistikKeuanganPemerintah Daerah Sumatera Utara 2014-2015*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- BPS.2014 *StatistikKeuanganPemerintah Daerah Sumatera Utara 2015-2016*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- BPS.2014 *StatistikKeuanganPemerintah Daerah Sumatera Utara 2016-2017*, Buku 1. Sumatera Utara. BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.

Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Di Tuntut Kemandirian Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Revisi *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*